TL2302

TIMOR TIMUR

SEKARANG WAKTUNYA UNTUK BICARA

“All people have the right to self-determination“

■ UN Declaration on Colonialism ■

Dipersembahkan kepada seluruh
rakyat Timor Timur khususnya,
dan mereka yang memperjuangkan
Hak Menentukan Nasib Sendiri
pada umumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Sudah Waktunya Bicara 1

Pendahuluan

Sedikit Latar Belakang Timor Timur 4

Bab I

Invasi Indonesia 8

Rakyat Timor Timur Sebagai Sarapannya Benny 9

Bab II

Perlawanan Rakyat Timor Timur 13

Gerakan Gerilya 13

Gereja Katolik di Timor Timur 14

Orang Timor Timur di Luar Negeri 14

Bab III

Pembangunan Imperialis & Pengembangan Imperialisme 16

Peningkatan Usaha-usaha Pembangunan: Peralihan Strategi Militer 18

Bab IV

Percaturan Diplomasi Internasional 21

Legitimasi Internasional Timor Timur 21

Dan Duniapun Mengecam 24

Dari "Teori Domino" ke Diplomasi Batik" 27

Lampiran I

Usulan Perdamaian Xanana Gusmao 36

Negosiasi Tanpa Syarat Di Bawah Naungan PBB 36

Lampiran II

Pledoi Xanana Gusmao 42

Kebohongan Orang Indonesia 47

kata pengantar :

SUDAH WAKTUNYA BICARA

Setelah tertunda-tunda sekian lama, akhirnya kami berhasil juga merampungkan penulisan ini. Selain kendala-kendala yang sifatnya sangat teknis, faktor-faktor non-teknis juga banyak menghambat pekerjaan ini. Salah satu faktor non-teknis yang sangat penting adalah, darimana kami dapat memperoleh bahan-bahan akurat untuk penulisan ini.

Seperti mungkin sudah diketahui banyak pihak, masalah Timor Timur, bagi kebanyakan orang Indonesia, adalah "Daerah Gelap" yang tak banyak diketahui selama kurun waktu 18 tahun!! Kalaupun kita mendengar atau menerima informasi tentang Timor Timur, selalu saja bersifat sepihak dan hanya dari satu-satunya sumber; Pemerintah Indonesia. Itupun, seperti biasanya, sangat bias pada kepentingan pemerintah. Tambahan lagi kultur politik kita, sejak sekian tahun hingga saat ini, belum mengenal (*baca belum boleh diperkenalkan*, Pen.) kebebasan memperoleh dan mengekspresikan informasi dalam pengertian yang sesungguhnya.

Ada memang sebagian orang, yang acapkali memperoleh kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, atau mereka yang mempunyai akses dengan organisasi-organisasi di luar negeri, atau mereka yang memang mempunyai kemampuan berbahasa inggris dengan baik, bisa dengan mudah memperoleh bahan-bahan bacaan dan informasi lainnya tentang Timor Timur yang ditulis oleh para penulis di luar negeri. Informasi dan bacaan mana yang berusaha, secara obyektif, membeberkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Timor Timur, sejak 18 tahun yang lalu. Namun toh, apa-apa yang telah mereka ketahui itu, hanya akan menjadi bahan bisik-bisik di tengah malam.

Masih segar dalam ingatan kita peristiwa pembantaian massal yang terjadi di Pemakaman Santa Cruz, Dili, 12 November 1991. Pembantaian yang menelan korban kurang lebih 100 orang itu, disaksikan oleh 7 orang asing, yang kebetulan berada di sekitar dan di antara para demonstran. Bahkan kesaksian itu sempat direkam oleh sebuah alat audio visual, yang kemudian disebarluaskan penayangannya di seluruh dunia. Masyarakat internasional mengecam dan menangisi peristiwa pembantaian keji itu. Kendati demikian, tetap saja pemerintah Indonesia, terutama kalangan militer, tidak mau mengakui secara jujur pembantaian biadab yang telah dilakukannya. Bahkan Panglima ABRI Try Sutrisno ketika itu, dengan angkuhnya menyatakan di hadapan para wakil rakyat DPR bahwa korban tewas hanya 19 orang. Tapi kemudian, atas desakan dan ancaman dunia internasional, pemerintah secara sepihak membentuk tim penyidik yang kemudian membantah keterangan Try Sutrisno, bahwa korban tewas adalah 50 orang.

Pemerintah, terutama kalangan militer, memang mempunyai kepentingan khusus agar apapun yang terjadi di Timor Timur tidak diketahui secara apa adanya oleh khalayak Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar aneksasi yang dilakukannya di Timor Timur, sejak 18 tahun yang lalu, mendapat dukungan seluruh rakyat Indonesia.

Tapi seperti pepatah yang mengatakan *sepandai-pandai kita membungkus bangkai, toh akhirnya akan tercium juga*, pemerintah Indonesia takkan mungkin selamanya dapat memendam kegelapan Timor Timur. Masyarakat Indonesia yang selama ini terus-menerus dibodohi, takkan mau selamanya dibodohi. Oleh perkembangan teknologi informasi, dunia terasa semakin kecil, dan apapun yang terjadi di belahan dunia manapun akan semakin tampak transparan.

Berdasarkan itulah kami merasa inilah moment yang paling tepat untuk berbicara; ***"It's time to talk."***

Dalam tulisan ini juga kami melampirkan konsep usulan perdamaian yang diajukan oleh bekas komandan gerilya Timor Timur (Fretilin), Xanana Gusmao. Dan seperti sudah kita ketahui bersama bahwa ABRI akhirnya berhasil menangkap dan mengadili Xanana Gusmao, maka di sinipun kami lampirkan pidato pembelaan (pledoi) Xanana Gusmao, yang ketika dibacakan, tidak diperbolehkan membaca seluruhnya. Kami menganggap adalah hak terdakwa, d.h.i. Xanana Gusmao, untuk membaca dan mengumumkan pidato pembelaannya itu kepada khalayak umum.

Concern kami dengan penulisan ini adalah, agar masyarakat Indonesia memperoleh informasi yang seimbang dan obyektif, tentang berbagai aspek yang melatarbelakangi persoalan-persoalan di Timor Timur. Selain itu juga, secara prinsipil, kami sangat concern pada penegakan prinsip-prinsip hak-hak azasi manusia di Indonesia. Dalam konteks Timor Timur, kami sangat mendukung agar dihargainya prinsip Menentukan Nasib Sendiri (The right of self determination) secara adil dan benar. Karena bila prinsip ini dilaksanakan, lewat referendum sesuai kaidah-kaidah internasional misalnya, maka adalah hak rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia atau tidak.

Hak untuk menentukan nasib sendiri diberi bobot perspektif yang sangat luas oleh para perancang Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia. Hak untuk menentukan nasib sendiri juga merupakan yang pokok untuk pencapaian kebebasan individu. Hak ini adalah **hak masyarakat** dan bukan **hak negara**. Artinya, hak tersebut adalah hak yang sudah harus dipandang sebagai hak sejak manusia lahir, dan samasekali bukan hak yang diberikan kemudian oleh negara. Dukungan bagi konsep ini merupakan penggerak utama dalam era dekolonisasi. Sejak pembentukan PBB 40 tahun yang lalu, bangsa mengikuti bangsa melaksanakan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Kejadian-kejadian internasional kini membuktikan bahwa konsep hak ini harus dipandang secara luas, dan **bukan hanya pencapaian kemerdekaan nasional** semata.

Dalam penulisan, yang sebagiannya, lebih merupakan perangkuman terhadap beberapa tulisan yang terbit di luar Indonesia ini, kami sangat dibantu oleh beberapa orang yang dengan ketekunan dan keikhlasannya membantu kami, yang dengan segala maaf pula tak mungkin kami sebut namanya di sini. Dari pengumpulan informasi, penerjemahan dan penulisan, editing, mengoreksi tulisan, setting dan lay-out, mereka telah memberikan yang terbaik demi terbitnya karya sederhana ini. Untuk itu semua mereka berhak memperoleh penghargaan, hormat, dan ucapan terimakasih.

Akhir kata, dengan rendah hati, kami ucapkan selamat membaca. Besar harapan kami agar karya sederhana ini berguna bagi para pembaca sekalian. ❐

pendahuluan :

SEDIKIT LATAR BELAKANG TENTANG TIMOR TIMUR

Timor, sebuah pulau yang bergunung-gunung dengan areal sekitar 12.000 mil, terletak di Indonesia bagian Timur, 300 mil ke arah utara dari Australia bagian utara. Timor Barat, kecuali Oecusse, termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. Sementara yang tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia adalah Timor bagian Timur, Oecusse, dan Pulau Atauro di sebelah utara pantai Dili.

Sebelum kedatangan pedagang-pedagang Eropa, Timor dikenal oleh para pedagang Cina sebagai sumber cendana. Perkampungan Eropa yang pertama dibentuk oleh Sekte Dominikan Portugis pada tahun 1566. 3 Abad berikutnya, Timor menjadi ajang konflik penguasaan antara Belanda dan Portugal. Akhirnya, pada tahun 1913, kedua belah pihak sepakat menandatangani suatu persetujuan untuk memisahkan Timor Barat dari Timor Timur. Timor Baratpun masuk ke dalam wilayah Indonesia ketika proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Menurut Sensus Penduduk tahun 1980, penduduk Timor Timur berjumlah 555.350 jiwa. Lalu pada tahun 1984, jumlahnya meningkat antara 650.000 sampai 680.000 orang. Kebanyakan penduduk Timor Timur adalah orang asli Timor dan beberapa ribu di antaranya berasal dari Cina serta Eropa. Sampai pendudukan tentara Indonesia, Bahasa Portugis adalah Bahasa resmi Timor-Timur. Tetapi hingga sekarang bahasa-bahasa asli masih dipakai, termasuk Bahasa Tetum yang merupakan bahasa asli utama Timor-Timur. Sebanyak 80% dari jumlah penduduk wilayah ini menganut agama Katolik.

Masa penjajahan Portugis terkenal sebagai masa pengabaian. Sampai paruh abad-19, penjajahan Portugal hanya mempunyai sedikit dampak terhadap masyarakat asli Timor-Timur. Kegiatan ekonomi utama pada waktu itu adalah pertanian subsisten serta perburuan rusa dan babi. Pembangunan fisik yang dilaksanakan penguasa Portugis sangat sedikit, termasuk tidak adanya penyediaan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Pada pertengahan abad-19 itu juga, Portugal memperkenalkan perkebunan kopi. Lalu pada abad-20, disusul dengan beberapa usaha untuk mengembangkan perkebunan karet, tembakau, kacang, dan kopra. Namun, kopi tetap menjadi andalan utama ekspor Timor Timur sampai saat ini.

Selama kurun waktu penjajahan Portugis, pemberontakan- pemberontakan anti-Portugis di Timor-Timur sering terjadi. Pemberontakan terakhir berlangsung selama 15 tahun, sejak akhir tahun 1880-an sampai 1912. Pemberontakan ini baru dapat dikalahkan setelah Portugis mendatangkan kapal-kapal perangnya khusus untuk menghancurkan perlawanan ini. Jumlah korban perang dari pihak Timor-Timur ketika itu, mencapai 3000 jiwa.

Selama perang Dunia Kedua, seperti juga Timor Barat, Timor Timur diduduki oleh tentara Jepang. Sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi, sebab pada waktu itu Timor Timur masih berada di bawah jajahan Portugal yang dianggap sebagai kekuatan netral. Pendudukan Timor Timur oleh tentara Jepang adalah akibat langsung dari kehadiran tentara komando Australia di sana yang, ketika itu, bermaksud menahan laju penyerbuan serdadu Jepang. Pada saat itu, peperangan gerilya dan anti-gerilya dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurut beberapa penilaian, korban yang jatuh dari pihak Timor Timur selama pembelaannya terhadap pasukan komando Australia, mencapai 40.000 jiwa.

Setelah Perang Dunia Kedua, Timor Timur kembali dikuasai Portugal. Rezim penjajah yang sangat menindas ini sempat mengundang perhatian dan kritik dunia internasional. Pada tahun 1960-an, suatu lapisan elit pribumi yang terdidik, sebagai kaum nasionalis, muncul di Timor Timur. Tetapi, sebelum kudeta Gerakan Angkatan Bersenjata di Portugal pada tahun 1974, kekuatan- kekuatan politik Timor Timur pribumi tadi tidak diberi peluang untuk berkembang dengan bebas.

Pada bulan Mei 1974, tiga partai politik terbentuk yaitu; UDT (Uniao Democratica Timorensa/Persatuan Demokratic Timor), Fretilin (Barisan Revolusioner Untuk Kemerdekaan Timor Timur), dan Apodeti (Perhimpunan Rakyat Demokratis Timor). UDT adalah partai pertama yang menganjurkan federasi dengan Portugal. Sedangkan ASDT (Perhimpunan Demokrat Sosial Timor), cikal-bakal Fretilin, mengambil posisi yang lebih radikal. Di dalam manifestonya, ASDT mendesak agar penjajahan dan diskriminasi harus dibuang dan menuntut hak Timor Timur untuk merdeka. Sementara itu, Apodeti mendukung penyatuan (integrasi) dengan Indonesia. Hal ini tidak begitu aneh, karena Ali Murtopo -sebagai salah seorang arsitek invasi- diduga kuat berada di belakang pendirian partai tersebut. Karena itu adalah wajar bila Apodeti tidak mempunyai massa sebanyak ASDT dan UDT. Sebaliknya, mendapat dukungan penuh serta dimanfaatkan oleh Indonesia.

Gerakan Nasionalis berkembang pesat. Kekuatannya meningkat. Pada September 1974, ASDT yang berwatak lebih radikal, berganti nama menjadi Fretilin. UDT pun ikut pula mengambil sikap radikal, bergeser mendukung penuh kemerdekaan Timor Timur. Didorong oleh komisi dekolonisasi Portugal, dan sebagai reaksi terhadap propaganda Indonesia yang agresif dan memiliki siaran radio yang dipancarkan dari Kupang, Fretilin dan UDT akhirnya berkoalisi.

Dalam waktu yang agak singkat, koalisi UDT dan Fretilin berhasil terbentuk. Tetapi, pada akhir Mei 1975, sebagai akibat usaha Indonesia untuk memecah-belah kedua partai itu karena semakin radikalnya Fretilin, koalisi tersebut akhirnya buyar. Tetapi selama koalisi tersebut, mereka sempat menyelenggarakan program pendidikan pemberantasan buta huruf yang didasarkan pada metode Paulo Freire dan usaha-usaha menuju redistribusi tanah. Terpengaruh oleh gerakan di Angola dan Mozambique, Fretilin mulai menganjurkan strategi-strategi ekonomi swadaya, di mana sektor bisnis swasta harus dikendalikan. Sedangkan UDT menganjurkan perlunya peranan besar modal asing di dalam bidang pertambangan dan pariwisata. Tetapi, selama itu pula Indonesia melancarkan tekanan dan propaganda yang merusak perkembangan politik di Timor Timur.

Pada bulan Agustus 1975, sekelompok pemimpin UDT mendapat informasi bahwa Indonesia akan campur tangan bila Fretilin menguasai pemerintahan di Timor Timur, dan UDT termakan oleh isu ultimatum tersebut. Untuk mencegahnya, UDT melakukan kudeta. Instalasi-instalasi utama di Dili direbut dan Indonesia kembali mengeluarkan ultimatum yang disebarkan kepada aparat Portugis yang menuntut bahwa pemimpin-pemimpin Fretilin tertentu harus ditangkap dan ditahan. Walaupun ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah Portugal, tetapi pemerintah Potugal lebih memilih tidak campur tangan. Akibat dari kudeta ini, perang sipil pecah di Dili dan di daerah pegunungan tengah. Sekitar 1500 orang, kebanyakan tinggal di daerah pegunungan, meninggal akibat perang tersebut. Banyak tentara kolonial Portugal, lengkap dengan peralatan tempurnya, membelot secara massal untuk bergabung dengan Fretilin yang didukung mayoritas penduduk pedesaan.

Pada bulan September 1975, hampir seluruh daerah yang waktu itu dikenal sebagai Timor Portugis telah dikuasai Fretilin. ❐

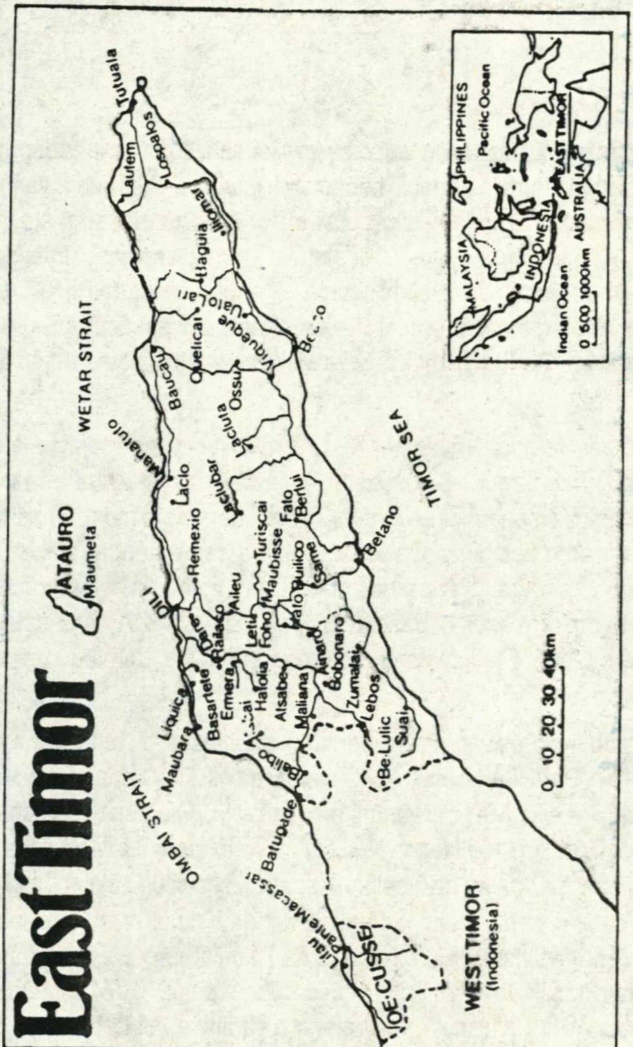
East Timor
ATAURO
Maumeta
WETAR STRAIT
OMBAI STRAIT
TIMOR SEA
WEST TIMOR
(Indonesia)
OE-CUSSE
Lifau
Pante Macassar
Batugade
Balibo
Maubara
Liquica
Dili
Manatuto
Baucau
Laga
Lautem
Lospalos
Tutuala
Iliomar
Ilaguia
Uato Lari
Viqueque
Beaco
Quelicai
Ossu
Laclula
Laclubar
Laclo
Remexio
Aileu
Turiscai
Maubisse
Fato Berliu
Same
Betano
Hato Builico
Ainaro
Bobonaro
Zumalai
Lebos
Suai
Be Lulic
Maliana
Atsabe
Hatolia
Ermera
Basartete
Letefoho
Dare
Railaco
0 10 20 30 40km
PHILIPPINES
Pacific Ocean
MALAYSIA
INDONESIA
EAST TIMOR
AUSTRALIA
Indian Ocean
0 600 1000km

bab I:

INVASI INDONESIA

Fretilin pada mulanya mengusahakan agar kemerdekaan tidak terlalu cepat diproklamasikan, dengan tetap mengakui kedaulatan Portugal. Gubernur yang memindahkan karesidenannya ke pulau Atauro karena perang sipil, terus-menerus didesak agar kembali ke Dili untuk menyelesaikan proses dekolonisasi secara bertahap yang telah dimulai. Menurut perkiraan Fretilin, proses dekolonialisasi akan memakan waktu 5 tahun. Karena desakan Fretilin ini ditolak oleh pemerintahan Portugal, maka Fretilin mengambil pemerintahan defacto.

Dari bulan September sampai November 1975 Fretilinlah yang mejalankan roda pemerintahan di Timor Timur. Selama itu pula delegasi Australia dan Indonesia diundang untuk mengunjungi Timor Timur, dan pemimpin Fretilin terus-menerus menegaskan keinginannya untuk bekerja sama dengan negara tetangga, ASEAN dan lainnya. Pengamat-pengamat asing yang sempat mengunjungi Dili waktu itu, termasuk sebuah kelompok dari ACFOA, mencatat dan mengakui pemerintahan Fretilin yang bertanggungjawab dan berkuasa dengan dukungan rakyat.

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap gerakan nasionalis di Timor Timur melewati beberapa tahap. Pada bulan Juni 1974 Jose Ramos Horta, pada waktu itu menjabat sebagai Sekjen ASDT mengunjungi Jakarta. Dia diberi sepucuk surat oleh Adam Malik (Menteri Luar Negeri, waktu itu), yang menyatakan bahwa: "Kemerdekaan setiap bangsa adalah hak setiap negara, termasuk rakyat Timor Timur." Namun setelahnya, pemerintah Indonesia dengan dukungan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam, mulai mundur dari komitmen yang sudah diucapkan oleh Adam Malik itu. Lalu, pada bulan September 1974, selama kunjungannya ke Indonesia, Whitlam menyatakan; "bahwa sebuah negara

Timor Timur yang merdeka tidak dapat berjalan, karena akan merupakan ancaman potensial terhadap kawasan ini".

Pemerintah Indonesia sendiri merasa khawatir bila bertetang-ga dengan suatu negara merdeka yang kebijakan politiknya sangat merakyat. Jelas hal itu akan melunturkan kewibawaan RI di mata Internasional, terutama AS, dan juga akan memberi peluang tuntutan serupa lainnya di Indonesia oleh gerakan-gerakan Aceh Merdeka dan Papua Merdeka. Sikap ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh sikap pemerintah AS dan Uni Soviet yang melakukan tindakan-tindakan pada sekutunya. Pada bulan September 1974, terjadi perundingan-perundingan antara Apodeti dan pemerintah Indonesia yang didukung oleh siaran radio dari Kupang yang menuduh Fretilin sebagai "komunis" dan UDT adalah "neofasis." Pada bulan Desember, Adam Malik menyatakan hanya ada 2 pilihan untuk Timor Timur: bersatu dengan Indonesia atau kembali pada kekuasaan Portugal.

Tahun 1975, tekanan dari Indonesia makin meningkat. Pada bulan Maret, Timor Barat yang merupakan wilayah Indonesia, dinyatakan tertutup bagi wartawan. Bulan September berikutnya, setelah kemenangan Fretilin dalam perang sipil, tentara Indonesia mulai mengadakan kegiatan intelijen terselubung (undercover) di Timor Timur bagian Barat. Pada bulan Oktober, 5 orang wartawan Australia, yang sedang berada di Timor Timur untuk melaporkan masuknya tentara Indonesia ke Timor Timur, ditembak mati.

Tanggal 28 November 1975, sebagai usaha menarik perhatian Internasional dan dukungan diplomatik, para pemimpin Fretilin memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur. Timor Timur dinyatakan sebagai Republik Demokratik dengan Xavier do Amaral sebagai Presidennya.

Rakyat Timor Timur Sebagai Sarapannya Benny

"Sarapan pagi di Dili, makan siang di Baucau, makan malam di Los Palos," dinyatakan oleh Jenderal Benny Moerdani dengan bangga sebagai komandan penyerangan ke Timor Timur pada tanggal 7 Desember 1975. Serangan beruntun dari darat, laut dan udara ini memperlakukan rakyat setempat dengan kejam. Pembunuhan massal terjadi di Dili, gedung-gedung dirampok dan dibakar. Benny dalam penilainnya, hanya memerlukan waktu beberapa minggu saja untuk menduduki Timor Timur. Sebagian besar dunia Internasional juga beranggapan demikian. Akan tetapi, beberapa hari sebelum invasi, di pulau Atauro, seorang kolonel Portugis mengatakan kepada 12 orang Australia yang diterbangkan dari Dili, bahwa gerakan perlawanan rakyat Timor Timur mempunyai 3000 tentara garis depan, 10.000 pasukan cadangan serta persediaan senjata dan amunisi.

Pada bulan-bulan pertama setelah invasi, Indonesia menduduki hampir semua kota-kota utama, tetapi masih sedikit menguasai daerah-daerah lainnya. Tiga bulan setelah invasi, baru ABRI dapat mengusai daerah pesisir, daerah dekat perbatasan Timor Barat dan daerah-daerah lain yang dapat dijangkau lewat jalan.

Pada tahun berikutnya, militer Indonesia berhasil memperluas wilayah yang dikuasai, walaupun jumlah korban sangat besar, baik di pihak rakyat Timor Timur maupun pihak ABRI. Menurut penilaian dari sumber gereja Katolik, jumlah korban kelaparan dan perang mencapai jumlah 200.000 jiwa.

Agak sulit untuk menilai jumlah korban di pihak Indonesia karena sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia, perang di Timor Timur harus dirahasiakan. Cukup untuk dikatakan di sini bahwa jumlah pemakaman militer Indonesia di Timor Timur tidak sedikit, dan ada yang mengatakan jumlah korban di pihak Indonesia telah mencapai 20.000 jiwa.

Strategi peperangan Indonesia yang terkenal, misalnya pembantaian massal rakyat Timor Timur yang disebut sebagai "perisai manusia," pemindahan masyarakat Timor Timur dari desanya masing- masing ke tempat tawanan, pendeportasian orang ke Pulau Atauro, penyitaan simpanan makanan, dan lain-lain. Daerah-daerah yang diduga tempat melarikan diri rakyat Timor Timur akibat dari kekejaman perang, dibom habis. Selain itu semua, hubungan Timor Timur dengan dunia luar ditutup sebagai bagian dari strategi perang Indonesia, termasuk daerah-daerah pegunungan. Akibat dari politik isolasi tentara Indonesia ini, pada tahun 1978 dan 1979, puluhan ribu orang Timor Timur mati kelaparan.

Lewat suatu serangan militer Indonesia pada tahun 1978, hubungan radio antara Gerakan Gerilya Timor Timur dengan beberapa pendukungnya di Australia telah terputus. Sedang warga Australia yang menyiarkan siaran-siarannya dari Darwin dituduh pemerintah Australia melakukan kegiatan ilegal.

Sejak tahun 1975, akses media luar negeri ke Timor Timur juga sangat dibatasi oleh pemerintah Indonesia. Wartawan-wartawan luar negeri yang diperbolehkan masuk selalu harus melalui seleksi pemerintah Indonesia terlebih dahulu.

Pada tahun 1989, Indonesia menyadari bahwa larangan-larangan terhadap masuknya orang asing ke Timor Timur sama sekali tidak menguntungkan posisi Indonesia di dunia Internasional. Maka, monopoli informasi dan pembatasan-pembatasan yang diciptakan untuk kepentingan politik sejak tahun 1975 telah diubah. Pada bulan Januari 1989, wilayah Timor Timur pun dinyatakan resmi terbuka untuk kunjungan yang bersifat wisata.

Laporan-laporan tentang kebencian rakyat Timor Timur terhadap pendudukan militer Indonesia juga diperkuat oleh kesimpulan bersama yang diambil oleh orang-orang yang sempat mengunjungi daerah itu sejak 1989.

Pada bulan Oktober 1989, Paus Paulus II mengadakan kunjungan singkat ke Dili. Masyarakat Timor Timur mengambil kesempatan ini untuk melakukan protes keras terhadap penguasaan Indonesia. Pada bulan Pebruari 1990, pada saat Duta Besar Amerika Serikat berkunjung ke Dili, sebuah protes juga dilancarkan. Kedua kasus ini membawa akibat yang sangat buruk bagi masyarakat Timor Timur, yaitu dalam bentuk penangkapan, penahanan dan penyiksaan. Wartawan-wartawan asing yang ada di sana waktu itu, dalam rangka melaporkan kunjungan tersebut, menyimpulkan bahwa komitmen pemuda-pemudi Timor Timur yang menerima pendidikan Indonesia tidak berbeda gairah nasionalismenya dengan angkatan yang dididik oleh sistem Portugal.

Sejak 1975, banyak dana ditanam oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Lima ratus SD, SMP dan SMA, satu universitas dan satu polyteknik telah dibangun oleh pemerintah Indonesia sejak invasi. Tetapi pembangunan tersebut tidak dapat memadamkan api perlawanan. Kebencian masyarakat Timor Timur terhadap pendudukan militer Indonesia dipertajam oleh makin meningkatnya jumlah pendatang Indonesia ke Timor Timur. 20 % dari seluruh penduduk Dili, yang seluruhnya mencapai 120.000 jiwa, kini berasal dari luar Timor Timur.

Aparat intel, polisi dan militer tinggal di hotel-hotel khusus untuk memonitor kegiatan-kegiatan turis. Pengunjung-pengunjung ke Timor Timur sering mencatat suasana ketakutan dan kebiasaan orang Timor Timur untuk menghindari pengunjung-pengunjung asing secara tidak wajar.

Selama kunjungan delegasi pemerintah Australia pada bulan Februari 1991, suasana di Timor Timur diliputi keamanan ketat. Menurut laporan beberapa wartawan asing, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu dengan unsur-unsur anti-integrasi. ❐

FRETILIN
MATE KAMORIS UCUN HACKAN
VIVA POVO MAU-BERE

A Fretilin rally, 1975

photo: Oliver Strewe

bab II:

PERLAWANAN RAKYAT TIMOR TIMUR

Gerakan Gerilya

Selama tahun 1978-1979, pasukan Indonesia mulai mengalahkan gerakan gerilya yang dipimpin Fretilin. Tetapi pada tahun 1981, gerakan gerilya diatur kembali di bawah pimpinan Xanana Gusmao. Sejak 1981, Xanana dan pasukannya berhasil melawan serangan- serangan ABRI yang dilengkapi peralatan perang dari Amerika.

Menurut beberapa penilaian, gerilya Timor Timur sekarang ini berjumlah 500 sampai 2000 tentara. Situasi dan kondisi para gerilya menyulitkan penilaian jumlah pasukan mereka secara tepat, karena strategi perang gerilya yang didasarkan pada pembentukan unit-unit otonom yang kecil dan sering berpindah-pindah.

Serangan-serangan Indonesia dimulai kembali menjelang akhir tahun 1990, di mana dikerahkan 25.000 tentara, dua skwadron helikopter dan para wajib militer (milisi) Timor Timur. Serangan ini bertujuan untuk membasmi gerilya-gerilya sebelum kunjungan delegasi Parlemen Portugal, yang dijadwalkan pada bulan Nopember 1991, namun akhirnya dibatalkan pada akhir bulan Oktober 1991.

Berbeda dengan pasukan gerilya di Eritrea, Tigray, Cuba, Angola dan Mozambique, Xanana dan pasukannya yang kecil tidak menerima dukungan dari luar. Tetapi, pertahanan gerakan gerilya bukan hanya ditentukan oleh keterampilan bertempur dan komitmen mereka saja, tapi juga ditentukan oleh dukungan rakyatnya. Dalam hal ini, dapat dibuktikan bahwa gerakan gerilya Fretilin memang mendapat dukungan luas dari rakyat luas Timor Timur. Hal itu nampak pada bagaimana rakyat Timor Timur membantu komunikasi para gerilyawan dengan keluarga-keluarga mereka di luar negeri, misalnya, dalam hal surat-menyurat.

Selain itu, keinginan rakyat Timor Timur untuk mencapai kemerdekaan juga sangat terlihat.

Gereja Katolik di Timor Timur

Gereja Katolik di Timor Timur, diwakili oleh dua keuskupan. Sejak invasi, Indonesia memegang satu keuskupan. Tetapi, keuskupan asli Timor Timur terus-menerus memprotes pelanggaran hak azasi manusia di Timor Timur serta terus berusaha untuk bertemu dengan aparat pemerintah Indonesia dan menuntut agar hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri dihargai.

Sejak invasi Indonesia ke Timor Timur, telah terjadi peningkatan pesat keanggotaan gereja Katolik. 80% dari seluruh penduduk Timor Timur menganut agama Katolik, sedang sebelum invasi, hanya kurang dari 40%. Suster-suster dan pastor-pastor memainkan peranan penting dalam mempertahankan harapan rakyat Timor Timur.

Pada bulan Pebruari 1989, dalam suratnya kepada SekJen PBB, Uskup Ximenes Belo menuntut diadakannya referendum mengenai nasib bangsa Timor Timur. Surat kontroversial ini sekaligus juga berarti menolak klaim pemerintah Indonesia bahwa integrasi dengan Indonesia adalah pilihan rakyat Timor Timur sendiri. Menurut Belo, rakyat Timor Timur tidak pernah diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya mengenai hal ini. Surat Belo ini tidak pernah dibalas oleh SekJen PBB, tetapi sempat mendapat tanggapan dari beberapa tokoh gereja Katolik.

Integrasi Timor Timur ke Republik Indonesia tidak diakui oleh Vatikan, karena itu keuskupan Dili berada langsung di bawah administrasi Vatikan di Roma, dan bukan di bawah KWI (Konggres Wali Gereja Indonesia) yang berpusat di Jakarta.

Orang Timor Timur di Luar Negeri

Sekitar 20.000 orang Timor Timur kini hidup mengungsi di luar negeri, kebanyakan berada di Australia dan Portugal.

Pengusiran masyarakat Timor Timur dari tanah air mereka sendiri mulai pada bulan Agustus 1975, dengan kudeta yang dilakukan oleh UDT dan mendapat perlawanan dari Fretelin. Percekcokan antar-suku dan antar-keluarga telah mempertajam konflik-konflik politik dan pertengkaran yang menyertainya. Waktu kemenangan Fretilin sudah di ambang pintu, sejumlah pendukung UDT melarikan diri ke Timor Barat, dan terus menyebar ke Portugal, Australia, Macau atau Taiwan.

Setelah invasi Indonesia, sedikit demi sedikit, dengan dukungan dari pemerintah Portugal dan Australia, penduduk-penduduk Timor Timur melarikan diri dari kekejaman militer Indonesia. Pada awalnya, kedua kelompok Timor Timur yang utama (UDT & Fretelin) di Portugal dan Australia, saling bermusuhan. Para pendukung UDT menganggap kemenangan Fretilin dalam perang sipil yang mendahului invasi Indonesia sebagai kesalahan, karena hal itu menyebabkan perpecahan antar keluarga berdasarkan latar belakang partai politik. Sementara para pendukung Fretilin menganggap kudeta UDT yang menjadi penyebab bencana-bencana yang terus-menerus menimpa bangsanya.

Sementara itu Fretilin terus melancarkan gerakan politik- diplomasinya di tingkat PBB. Hal ini ditunjang oleh keterampilan Jose Ramos Horta, wakil Fretilin di luar negeri, dalam berpolitik dan bernegosiasi. Pada tahun-tahun terakhir ini, gerakan Timor Timur di luar negeri sudah sangat berubah. Perlakuan militer Indonesia dengan segala bentuk penindasannya, serta sikap dan komitmen bagi sanak-saudara di Timor Timur, menyebabkan diadakannya kembali pendekatan antara kelompok-kelompok pendukung Fretilin dan UDT.

Inilah yang disebut "tindakan bertemu" (*convergencia*). Sekarang, Fretilin dan UDT bekerjasama demi tercapainya kemerdekaan Timor Timur. Walaupun begitu, otonomi masing-masing pihak tetap dihargai. Kedua partai ini, sering bekerjasama dalam perundingan-perundingan dengan pemerintah Portugal, dan dalam menghadiri forum-forum pertemuan PBB.

Semua orang Timor Timur di luar negeri sangat menyesalkan keadaan tertindas yang diderita saudara-saudaranya di Timor Timur dan menyambut dengan senang hati segala tindakan yang membantu proses penentuan nasib sendiri bangsa Timor Timur oleh rakyat Timor Timur sendiri. ❐

bab III :

PEMBANGUNAN IMPERIALIS & PENGEMBANGAN IMPERIALISME

Pembangunan di Timor Timur memang tidak jauh berbeda dengan model pembangunan Orde Baru di propinsi-propinsi Indonesia lainnya. Struktur politik-ekonomi di Indonesia dengan model perencanaannya yang bersifat top-down dan berorientasi proyek sangat membatasi peluang-peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Watak pembangunan di Timor Timur juga dipengaruhi oleh penggunaan pendekatan keamanan. Pendekatan ini digunakan untuk melegitimasi kehadiran 13 batalyon militer, dengan jumlah total 11.000 tentara (jumlah intel dan polisi belum terhitung), di suatu daerah yang penduduknya hanya 700.000 jiwa.

Pembangunan ekonomi dan sosial yang sedang dilaksanakan di Timor Timur merupakan unsur pokok dalam pendekatan keamanan, yaitu dalam usaha ABRI untuk membasmi gerakan anti-integrasi. Proyek- proyek pembangunan di Timor Timur adalah oleh dan untuk ABRI dan tidak ditujukan ke perbaikan mutu kehidupan masyarakat setempat.

Pemerintah Indonesia dengan sangat bangga sering menyebut keberhasilannya dalam meningkatkan pendapatan per kapita, dari Rp 30.000 per tahun pada tahun 1975 menjadi Rp 300.000 per tahun pada tahun 1989. Tetapi sudah bukan rahasia lagi bahwa statistik- statistik yang dikemukakan pemerintah sering tidak mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Apalagi, peningkatan pendapatan per kapita tidak akan berarti apa-apa selama kehidupan masyarakat Timor Timur tetap didominasi oleh kehadiran militer dengan segala kekejamannya.

Sistem produksi di Timor Timur sangat diganggu oleh strategi militer di sana. Sejak tahun 1975, 90% dari penduduk Timor Timur dipindahkan secara paksa oleh militer Indonesia dari tanah nenek moyangnya. Karena adanya kegiatan militer yang sering beroperasi di daerah pegunungan, masyarakat setempat tidak diperbolehkan untuk naik ke gunung-gunung. Padahal, kebiasaan mereka ketika musim paceklik tiba, adalah untuk mencari daun- daunan dan biji-bijian di daerah pegunungan. Larangan tersebut pada akhirnya menimbulkan kelaparan sebagai gejala tahunan setelah musim panen bulan Maret. Di balik ini semua adalah strategi militer untuk membatasi kegiatan masyarakat Timor Timur. Strategi militer itu juga bertujuan untuk memblokir jaringan para gerilya, yang bersembunyi di daerah pegunungan, dengan masyarakat umum yang selalu memasok kebutuhan hidup sehari-hari para gerilya.

Alasan lain dari kehadiran militer di Timor Timur adalah peranannya dalam penanaman modal di sana, karena ABRI-lah yang bertanggungjawab atas pemberian izin untuk penanaman modal. Sebagai akibat langsung, ABRI pulalah yang menguasai kebanyakan penanaman modal di Timor Timur. Menteri Pertahanan dan Keamanan, Benny Moerdani, juga sangat terlibat dalam ekonomi Timor Timur. Di bawah perlindungan Benny, Robby Sumampaw, seorang pengusaha besar, memegang monopoli kopi di Timor Timur. Monopolisasi ini telah membawa dampak negatif terhadap pendapatan petani. Sejak zaman Portugis, sebagian besar pendapatan petani berasal dari penanaman dan penjualan kopi. Di bawah sistem Indonesia, Koperasi Unit Desa adalah saluran tunggal untuk penjualan kopi petani. KUD ini suka menonjolkan topengnya sebagai koperasi petani, tetapi, seperti dikeluhkan para petani Timor Timur, dalam kenyataannya KUD hanyalah alat perusahaan ekspornya Sumampaw. Monopolisasi ini juga digunakan dengan sewenang-wenang untuk menjatuhkan harga kopi, sehingga para petani menjadi sangat dirugikan.

LB. Moerdani dalam kasus pembantaian di Dili terlibat dalam permainan politik. Kejadian ini melegitimasikan kehadiran ABRI untuk mengontrol semua percaturan bisnis di Timor Timur agar tidak dikuasai anak-anak Suharto. Militer di bawah koordinasi Benny akan memperluas bisnisnya ke marmer (batu pualam), di mana saat ini ia menguasai 100 hektar daerah batu pualam yang terletak antara Dili-Baucau di sekitar daerah Manatuto. Orang dekat Benny yang terjun ke dalam bisnis batu pualam ini adalah Markus Wanandi, seorang pastor di Timor Timur, yang juga adik direktur CSIS Yusuf Wanandi.

Sebagian besar dana pembangunan daerah Timor Timur disediakan untuk pembangunan sekolah-sekolah. Sekitar 500 Sekolah Dasar telah dibangun selama pendudukan Indonesia, dan karena itu jumlah penduduk Timor Timur yang buta huruf mengalami penurunan pesat sejak saat itu. Walaupun demikian, pembangunan intensif, perbaikan fasilitas-fasilitas pendidikan sejak invasi tidak dapat mengurangi ketidakpuasan para pemuda-pemudi Timor Timur. Peluang pekerjaan untuk mereka dalam administrasi sipil makin lama makin sempit. Baru-baru ini pemerintah Indonesia berusaha untuk memindahkan tenaga kerja Timor Timur ke pulau- pulau yang lain. Pada tahun 1990, sejumlah besar murid-murid SMA Timor Timur ditransmigrasikan oleh pemerintah ke Jawa dan pulau- pulau lainnya di mana mereka dipekerjakan di berbagai pabrik. Ini yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai usaha pemerintah Indonesia untuk membersihkan Timor Timur dari unsur-unsur anti- integrasi sebelum kunjungan delegasi parlemen Portugal.

Peningkatan Usaha-Usaha Pembangunan: Peralihan Strategi Militer?

Selama daerah Timor Timur dianggap oleh dunia internasional sebagai zona perang, potensi ekonominya tak dapat dimanfaatkan, karena penanam modal asing agak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di wilayah-wilayah yang secara politik tidak stabil. Keraguan ini pada akhirnya juga akan merugikan militer, karena merekalah yang menarik manfaat dari pembangunan kapitalis di sana melalui komisi atau pembentukan koperasi militer, sesuai dengan peraturan penanaman modal asing oleh pemerintah Indonesia, di mana pihak pemodal asing harus bekerjasama dengan pihak Indonesia dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture).

Beberapa pernyataan tokoh-tokoh pemerintah dan militer setelah peristiwa Dili menandai niat militer untuk mengalihkan strategi di Timor Timur. Tidak lama setelah pembantaian, Menteri Dalam Negeri Rudini, mengumumkan pendapatnya bahwa sudah saatnya sekarang untuk meninggalkan pendekatan keamanan. Ini ditantang oleh Panglima ABRI, Jenderal Try Sutrisno, yang mengatakan dalam laporannya ke DPR bahwa pecahnya peristiwa Dili membuktikan tetap adanya keresahan sosial di Timor Timur dan, karena itu, pendekatan keamanan harus dipertahankan. Jenderal Edy Sudrajat, Kepala Staf Angkatan Darat, menyusul Try dengan pengumumannya bahwa strategi militer di Timor Timur sekarang akan difokuskan pada operasi teritorial katimbang operasi-operasi intelijen dan tempur seperti dilaksanakan pada tahun-tahun awal pendudukan Indonesia. Tidak lama setelah itu, Gubernur Timor Timur, Mario Carascalao, menyambut dengan senang hati usaha-usaha oleh para konglomerat untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada di Timor Timur.

Kebetulan, anggaran Timor Timur untuk tahun fiskal yang akan datang mengalami peningkatan 35.1%, jauh di atas peningkatan 23.7% yang rata-rata diterima oleh propinsi-propinsi lain.

Sugyanto, Kepala Bappenas mengatakan bahwa pemerintah akan sejauh mungkin mendorong partisipasi masyarakat Timor Timur dalam pembangunan - sesuatu yang sebenarnya mustahil di bawah struktur birokrasi Orde Baru yang sangat sentralistis.

Baru-baru ini, ada minat baru dari perusahaan asing dan domestik untuk menanam modalnya di Timor Timur. Tentu saja, militer akan mengambil peran besar dalam perkembangan baru di bidang ekonomi ini. Pada tanggal 27 Desember 1991, sebuah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Matahari Group dengan penguasa Operasi Teritorial Timor Timur. Persetujuan inilah yang memberi lampu hijau kepada Matahari untuk membuka tokonya di Dili. Pada hari yang sama, 10 perusahaan bergabung di bawah satu perusahaan payung, TimTim Development Corps, untuk menandatangani sebuah kontrak kerjasama. 10 perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: Astra International, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon Indonesia, Garuda Indonesia, Great River Garments, Puncak Matahari, Puskopad Kodam Udayana IX, Bintang Tatamilau Cemerlang dan Perum Telkom.

Probosutedjo, adik tiri Presiden Suharto, juga berniat menanam modal di Timor Timur, di bidang telekomunikasi.

Dili juga merupakan salah satu wilayah Indonesia Bagian Timur, yang akan dikembangkan oleh Pemda untuk industri pariwisata. Pada tahun 1989, Timor Timur dibuka kembali untuk pariwisata. Tetapi, sampai sekarang belum ada prasarana yang mampu mendukung pembangunan industri wisata berskala besar. Didasarkan model pembangunan industri pariwisata di Bali, sebuah BUMN, East Timor Tourism Development Board, sudah dibentuk, dan bertanggungjawab atas segala pembangunan di bidang wisata di Timor Timur.❐

bab IV :

PERCATURAN DIPLOMASI INTERNASIONAL

Legitimasi Internasional Timor Timur

Pada tahun 1975, resolusi pertama yang menyangkut invasi tentara Indonesia ke Timor Timur telah disyahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang sama juga disyahkan (dengan 72 suara setuju, 10 menentang dan 14 absen) di Majelis Umum. Resolusi-resolusi pertama ini, disponsori Algeria, Kuba, Trinidad, Senegal, Sierra Leone dan Tanzania, yang menuntut penarikan mundur pasukan-pasukan Indonesia dari wilayah Timor Timur, sehingga hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri segera terwujud. Sekali lagi, pada tahun 1976, suatu resolusi Masalah Timor Timur disyahkan di Dewan Keamanan. Dalam resolusi-resolusi berikutnya yang diajukan setiap tahun dalam Majelis Umum, dari tahun 1976 sampai 1982, tuntutan-tuntutan tersebut diulangi kembali. Sejak 1982, tanggung jawab atas Masalah Timor Timur telah dilimpahkan ke SekJen PBB. PBB sendiri tidak pernah mengakui secara *de facto* ataupun *de jure* aneksasi Timor Timur yang di luar hukum itu, walaupun aneksasi tersebut telah diakui oleh beberapa negara anggota PBB.

Dalam rangka 'menyelidiki keadaan', pada tahun 1976, seorang utusan SekJen PBB, mengunjungi Timor Timur. Juga, setelah pembantaian Dili tahun 1991, seorang utusan SekJen PBB, Amos Wako, mengunjungi Indonesia dan Dili dengan amanat dari SekJen untuk 'mencari keterangan' tentang peristiwa Dili.

Menurut hukum internasional, Portugal masih diakui sebagai negara yang bertanggungjawab atas administrasi Timor Timur. Portugal kehilangan kekuasaan riil di Timor Timur setelah kudeta Agustus 1975, sewaktu Gubernur

Portugal memindahkan kantornya ke pulau Atauro, dan pada akhirnya mengundurkan diri dari Timor Timur setelah invasi pasukan Indonesia.

Invasi tersebut terjadi pada saat politik dalam negeri Portugal sedang kacau. Tahun-tahun 1974-1976 adalah tahun-tahun revolusi di Portugal dan, sebagai akibatnya, keanggotaan kabinet pemerintahan Portugal sering berobah. Apalagi, Portugal sedang sibuk dengan usaha dekolonisasi Angola, Mozambique dan Giunea Bissau, di mana gerakan-gerakan gerilya dapat mengalahkan pasukan Portugal, terutama di Angola dan Mozambique.

Hubungan Portugal dengan negara-negara jajahannya di Afrika, secara ekonomi dan politik, sangat penting baginya. Perhatian Portugal terhadap kejadian-kejadian di Timor Timur, sebuah daerah yang jauh dari Portugal dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang kecil, dikalahkan oleh perobahan-perobahan yang terjadi di Afrika.

Namun, sejak akhir tahun 1970, keprihatinan aktif terhadap penderitaan masyarakat Timor Timur, karena diabaikannya Timor Timur oleh pemerintah Portugal, muncul lagi di Timor Timur. Kebanggaan dan status internasional negara Portugal juga dihina oleh pendudukan Indonesia. Maka persoalan Timor Timur menjadi opini publik di Portugal. Hal ini juga menjadi tanggungjawab Presiden Portugal dalam peranannya sebagai pembela Undang-Undang Dasar. Dua orang presiden Portugal yang memimpin Portugal dalam dua periode kepresidenan sejak 1975 hingga sekarang, senantiasa mengkampanyekan pencapaian penentuan nasib Timor Timur oleh rakyat Timor Timur sendiri.

Suatu pernyataan hasil kerjasama dengan Perdana Menteri Jepang, Toshiki Kaifu, pada bulan September 1990, Perdana Menteri Portugal Cavaso Silva menyatakan dukungannya untuk suatu penyelesaian melalui negosiasi.

Sampai sekarang, usaha-usaha diplomatik Portugal ditujukan kepada pengerahan dukungan internasional agar Sek-Jen PBB, yang pada tahun 1982 juga diperintah oleh Majelis Umum, dapat memberikan suatu penyelesaian menyeluruh terhadap Persoalan Timor Timur. Rencana kunjungan parlemen Portugal pada bulan November 1991 yang lalu, merupakan titik perhatian utama usaha Sek-Jen PBB dalam bidang ini. Namun kunjungan tersebut akhirnya dibatalkan oleh pihak Portugal, sebagai akibat dari penolakan pemerintah Indonesia terhadap keikutsertaan salah seorang anggota delegasi yang dianggap sebagai kader Fretelin.

Keberhasilan strategi Portugal di Eropa tercermin dari pernyataan-pernyataan Masyarakat Eropa di PBB, New York, dan dalam Sidang Komisi Hak Azasi Manusia di Jenewa. Dalam suatu pernyataan kepada Komisi Hak Azazi Manusia PBB di Jenewa pada bulan Februari 1991, ke-12 negara anggota ME mengucapkan "keprihatinan yang serius" terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia di Timor Timur serta menuntut suatu penyelesaian yang adil, sesuai dengan prinsip PBB dan kepentingan syah masyarakat Timor Timur. Dalam suatu pertemuan antara Masyarakat AKP (Afrika, Karibia dan Pasifik) dengan Masyarakat Eropa di Luxemburg pada bulan September 1990, telah dibuat suatu resolusi yang tegas mengenai Persoalan Timor Timur. Resolusi ini hanya ditolak oleh 1 negara (Sudan) dari 89 negara peserta.

Pada bulan Pebruari 1991, Portugal memulai upaya-upaya hukum melawan Australia di Persidangan Internasional. Menurut tuduhan Portugal, Australia, dengan menandatangani kontrak kerja Celah Timor, telah melanggar hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib bangsanya sendiri.

Di luar pemerintahan Portugal dan forum-forum PBB, usaha-usaha menuju terwujudnya hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, juga telah dilakukan. Di Amerika Serikat misalnya, beberapa anggota Kongres telah mendorong suatu resolusi yang menuntut agar bantuan militer ke Indonesia dihapus atau, paling tidak, dikurangi. Pada tahun 1977, Kongres mengadakan penyelidikan penuh terhadap masalah pelanggaran hak asasi di Timor Timur. Senat AS juga pernah melakukan hal yang sama. Pada tahun 1984, Menteri Luar Negeri, Edward Schultz, mengunjungi Jakarta untuk suatu pertemuan ASEAN, dan atas tekanan beberapa anggota Senat, ia juga telah mengangkat masalah Timor Timur.

Setelah peristiwa 12 November 1991, resolusi-resolusi yang mengutuk pembantaian telah diangkat baik di Kongres maupun di Senat. Kongres menuntut agar IMET, sebuah program pelatihan militer, ditinjau kembali untuk "menjamin bahwa program tersebut memajukan secara efektif hak asasi manusia". IMET, yang memakan sebanyak $US 2.3 juta (Rp 4,6 milyar) melayani pelatihan aparat-aparat militer Indonesia. Tuntutan-tuntutan terkandung dalam resolusi tersebut terwujud pada tanggal 25 Juni 1992, pada keputusan Kongres untuk mengurangi bantuan militer kepada Indonesia dengan memotong program IMET.

Sedangkan, resolusi Senat AS menuntut agar pemerintah AS mendukung suatu resolusi di Majelis Umum yang mendesak PBB untuk "mendorong penyelesaian konflik Timor Timur sehingga hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri dapat terwujud." Resolusi itu juga menuntut agar IMET dikaitkan dengan jaminan suatu penyelidikan yang lengkap dan tidak berpihak oleh pemerintah Indonesia. Resolusi juga mendesak agar pemerintah AS bekerja sama dengan PBB serta pemerintah Portugal untuk "mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan masalah- masalah yang paling mendasar di Timor Timur". Pada bulan Desember 1991, 50 anggota Senat menandatangani suatu surat yang mempertimbangkan laporan-laporan baru mengenai pelanggaran hak-hak azasi manusia, serta mendesak Presiden Bush untuk mengambil sikap yang lebih tegas mengenai masalah Timor Timur.

Belanda, bekas negara penjajah Indonesia, juga tidak tutup mulut terhadap masalah ini. Setiap tahun, kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi Hak Azazi Manusia di Belanda mengadakan acara khusus untuk menunjukkan kesetiakawanan mereka kepada rakyat Timor Timur. Sebagian dari acara ini adalah pertemuan antara organisasi-organisasi tersebut dengan pemerintah Belanda. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Pemerintah Belanda diberikan sejumlah informasi tentang keadaan hak asasi di Timor Timur dan ditekan untuk mengaitkan masalah pelanggaran hak azasi di Timor Timur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda. Dan, memang, Setelah pembantaian Dili, pemerintah Belanda mengancam akan menghentikan pencairan dana bantuan proyek-proyek bilateral yang baru.

Portugal, yang masih dianggap sebagai pemerintah administratif *de jure* di Timor Timur, juga telah mempersoalkan penandatanganan Perjanjian Celah Timor oleh Australia dan Indonesia di Pengadilan Internasional.

Dan Duniapun Mengecam

Pada tahun 1990, Indonesia telah menyetujui kunjungan Delegasi Parlement Portugal ke Timor Timur. Kunjungan ini dijadwalkan pada bulan November-Desember 1991, dengan tujuan "memperoleh informasi dari tangan pertama tentang keadaan di wilayah Timor Timur". Disepakati pula bahwa kunjungan tersebut "tidak bersifat penyelidikan". Dari kunjungan ini juga diharapkan dapat diperoleh "penyelesaian yang menyeluruh dan dapat diterima secara internasional". Namun, pada tanggal 26 Oktober 1991 kunjungan tersebut secara resmi dibatalkan.

Setelah Peristiwa Dili pecah. Banyak negara dan forum-forum di tingkat internasional, dengan latar belakang kepentingannya masing-masing, melontarkan kecaman dan ancaman kepada pemerintah Indonesia. Bahkan pemerintah-pemerintah asing yang jarang mengaitkan kerjasama pembangunannya dengan Indonesia dalam konteks pelanggaran hak-hak azasi di Timor Timur, menggunakan kesempatan ini untuk mengecam pemerintah Indonesia.

Menteri-menteri Luar Negeri Masyarakat Bersama Eropa (ME) juga telah mengeluarkan suatu pernyataan yang mengutuk pembantaian Dili. Bahkan Parlemen Eropa membuat sebuah resolusi yang mengutuk "terjadinya korban-korban terbaru dari pendudukan Indonesia yang di luar hukum itu", dan menuntut agar orang-orang yang bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut segera dihukum. Resolusi ini juga mendesak ME maupun PBB untuk melarang penjualan senjata ke Indonesia serta melakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian-perjanjian antara Indonesia dan masing-masing negara anggota ME.

Majelis Parlementer Dewan Eropa (the Parliamentary Assembly of the Council of Europe) mengeluarkan suatu tuntutan yang meminta agar "ABRI segera mundur dari wilayah Timor Timur, sehingga kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan hak masyarakat Timor Timur menentukan nasibnya sendiri, dapat segera terwujud". Tuntutan tersebut mendukung desakan-desakan untuk "suatu penyelidikan yang akurat, independen dan di bawah pengawasan internasional", serta larangan penjualan senjata dan dukungan militer bagi Indonesia.

Swedia dan Norwegia, yang tidak pernah ikut memberi suara dalam Resolusi Draft Timor Timur di Majelis Umum, serta Denmark, secara resmi memprotes pembantaian Dili, baik melalui Duta Besar Indonesia di negaranya masing-masing, maupun melalui para Duta Besar mereka di Indonesia.

Jepang, pemberi bantuan terbesar ke Indonesia, telah mengirim dua orang diplomat dari Kedutaan Besarnya di Jakarta untuk "mencari informasi yang jelas tentang pembantaian Dili". Seorang juru- bicara pemerintah Jepang mengatakan kemungkinan bahwa program bantuan pemerintah Jepang akan tergantung dari laporan KPN (Komisi Penyelidik Nasional).

Presiden Portugal, Mario Soares, secara tegas mengutuk pembantaian Dili dan segera menekan ME untuk mengirim misi penyelidik yang independen ke Timor Timur.

Kanada, untuk sementara menghentikan pencairan bantuan bilateral ke Indonesia, dengan syarat bahwa pencairan kembali bantuan tersebut tergantung pada laporan KPN. Padahal, Kanada pernah menolak empat Resolusi mengenai Timor Timur yang terakhir (1979- 1982) karena kepentingan ekonominya di Indonesia.

Setelah pembantaian Dili, PM Australia Bob Hawke, menyatakan bahwa dia akan mengunjungi Indonesia pada bulan Januari 1992 dengan syarat-syarat berikut:

1. pengumuman penyesalan yang sejati dari Pemerintah Indonesia
2. diadakan sebuah penyelidikan yang adil dan jujur
3. menghukum mereka yang bertanggungjawab atas pembantaian Dili

Dengan persetujuan Partai Buruh-nya, Hawke juga diminta untuk mendesak pemerintah Australia agar menyelidiki peran selanjutnya PBB dalam penyelesaian masalah Timor Timur, serta mendesak Menteri Luar Negeri, Gareth Evans, untuk mengunjungi Indonesia dalam rangka membicarakan segala hal yang bersangkutan dengan masalah Timor Timur. Dalam suratnya, 150 penduduk Australia yang terkemuka, mendesak Evans untuk mengakui bahwa keinginan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri sudah tidak dapat diragukan lagi. Surat tersebut juga mendesak Evans agar menekan pemerintah Indonesia untuk menerima tawaran dari gerakan nasionalis Timor Timur untuk memulai pembicaraan meja bundar di bawah pengawasan PBB. Surat itu juga menuntut agar Evans mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan para tahanan politik Timor Timur yang ditahan di Jakarta, Denpasar dan Dili.

Kegiatan-kegiatan di sekitar masalah Timor Timur, termasuk tuntutan, desakan, pernyataan atau resolusi yang dicetuskan di forum-forum internasional menunjukkan bahwa masalah Timor Timur memperoleh legitimasi internasional untuk diperdebatkan pada tingkat legislatif negara, maupun tingkat antar-negara. Karena itu, masalah Timor Timur ini sudah bisa dikatakan telah menjadi agenda internasional bagi sebagian besar pemerintah- pemerintah di dunia.

Perlu dicatat pula bahwa status masalah Timor Timur sebagai masalah internasional pernah diperkuat oleh kehadiran pers asing di Dili pada tanggal 12 November 1991. Berkat usaha beberapa wartawan asing dari media Barat, masalah Timor Timur diangkat dari sesuatu yang jarang diberitakan ke berita yang paling "panas".

Tetapi perdebatan mengenai sejauh mana masalah Timor Timur dapat dikatakan sudah menjadi masalah internasional bukan sesuatu yang relevan. Karena asumsi yang mendasari perdebatan tersebut adalah bahwa masyarakat internasional tidak perlu mempertanyakan masalah-masalah sosial-politik yang belum 'diinternasionalisasikan'. Karena, pada intinya, segala bentuk pelanggaran hak asasi, diinternasionalisasikan atau tidak, tetap akan menjadi masalah internasional sejauh pelanggaran tersebut memang merupakan keprihatinan masyarakat internasional yang mempunyai kepentingan untuk membela hak asasi manusia se-dunia.

Adalah ironis bila pemerintah Indonesia kecewa terhadap keprihatinan masyarakat internasional mengenai masalah Timor Timur, dan kecaman pemerintah Indonesia tentang pengkaitan pencairan bantuan dengan keadaan hak asasi di Timor Timur, sebagai imperialisme dan neo-kolonialisme, adalah sungguh mengada-ada. Karena, pada kenyataannya, dimasukkannya masalah Timor Timur dalam agenda PBB bukan akibat kebajikan spontan negara-negara anggota PBB, tetapi hasil usaha lobby gerakan nasionalis Timor Timur. Usaha-usaha lobby tersebut di forum-forum internasional adalah pilihan terakhir bagi gerakan nasionalis yang sebelum invasi sudah mengusahakan untuk mencapai persetujuan dengan Indonesia, yang memiliki niat imperialisnya sendiri. Maka bila citra Indonesia di mata internasional buruk, bukan karena gertakan kekuatan-kekuatan imperialis, tetapi justru akibat imperialisme Indonesia sendiri.

Dari "Teori Domino" Ke "Diplomasi Batik"

Setelah kekalahannya di Vietnam, Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Carter, terus berusaha untuk membasmi komunisme Asia Tenggara melalui perang ideologi dengan dalih 'Hak Asasi Manusia'. Dengan tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan Amerika, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di seluruh penjuru dunia yang terkena kebijakan luar negeri Amerika, pelanggaran hak asasi segera saja bisa menjadi masalah internasional (diinternasionalisasikan), dengan catatan: tergantung dari ideologi si pelanggar. Masyarakat dunia bisa saja menangis untuk korban-korban Pol Pot dan pelarian-pelarian Vietnam, tetapi seperti tidak mau tahu-menahu tentang pembantaian sebanyak 1 juta orang Indonesia selama tahun 1966- 1968, tentang pembunuhan ribuan mahasiswa oleh militer di Thailand 14 Oktober 1976, atau tentang kekuatan sewenang- wenang yang dimiliki oleh negara Singapore dan Malaysia dalam bentuk Hukum Keamanan Dalam Negeri (ISA: Internal Security Act).

Walaupun prinsip-prinsip hak asasi manusia pada intinya adalah a- ideologis, dan pelanggaran-pelanggaran terjadi secara pan- ideologi, internasionalisasi masalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi sangat timpang. Seperti sudah ditentukan oleh kebijakan- kebijakan luar negeri AS, pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang diinternasionalisasikan adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rezim-rezim yang bersikap bermusuhan terhadap kepentingan-kepentingan AS. Sebaliknya, dengan kebijakan luar negerinya, AS malah ikut menentukan domestikasi pelanggaran- pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang dekat dengan pemerintah AS. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh para penguasa tersebut tidak diinternasionalisasikan, tetapi justru dianggap sebagai urusan dalam negeri negara masing-masing. Dengan logika putar balik seperti inilah kita dapat mengerti mengapa pembantaian- pembantaian yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yang sangat mengerikan itu tidak pernah menjadi 'masalah internasional'.

Logika putar balik inilah yang juga dimanfaatkan Ali Alatas, ketika ia melakukan perjalanan diplomatiknya setelah peristiwa pembantaian Dili 12 November 1991 yang lalu, untuk menangkis kritik dunia internasional terhadap pelanggaran hak asasi yang dilakukan ABRI di Timor Timur. Misi Alatas ini tidak tergolong mudah, karena sejak dimuat dalam agenda PBB pada tahun 1975, Masalah Timor Timur telah mencapai status absah sebagai "masalah internasional." Namun jelas, Alatas memanfaatkan logika putar baliknya Amerika tadi, sambil berusaha meyakinkan dunia luar bahwa penyiksaan, penahanan, penyidangan dan pembunuhan sebanyak 200.000 jiwa orang Timor Timur adalah masalah interen Indonesia.

Jadi, walaupun dimasukkannya masalah Timor Timur dalam agenda PBB didasarkan pada hak masyarakat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, masing-masing negara anggota PBB yang mempunyai kepentingan ekonomi dan strategisnya sendiri-sendiri, sangat sedikit yang berusaha agar hak ini terwujud. Bukanlah hal yang aneh bila PBB dalam jaman penyelesaian konflik, dengan inisiatif yang diambilnya di Kuwait, Libya dan Kamboja, justeru setelah pembantaian Dili, pengawas dunia ini masih belum berhasil untuk mengambil langkah yang konkrit dalam penyelesaian masalah Timor Timur. Di sini sangat terlihat kepentingan-kepentingan imperialisme international dan kepentingan-kepentingan itu jelas tidak berniat untuk merongrong kewibawaan Indonesia di Timor Timur.

Empat bulan setelah Iraq melakukan invasi ke Kuwait, Majelis Umum PBB telah mengangkat 12 resolusi, dan lebih dari 250.000 tentara terus dikerahkan AS ke Timur Tengah 'atas nama PBB'. Ketika PBB sedang disibukkan dengan obsesi dua orang Libya, dan ketika PBB sedang sibuk merubah medan perang Kamboja menjadi pasar (*changing a war zone into a market place*), di Indonesia orang-orang Aceh mati dibunuh di atas tanah mereka sendiri, korban-korban pembantaian Orde Baru sudah terlupa, dan seperti adegan dalam naskah cerita George Orwell, 13 orang Timor Timur yang dituduh mengganggu ketertiban umum, disidang dan sebagian dijebloskan ke penjara, dengan hukuman penjara di atas 10 tahun.

Tidak adanya tanggung-jawab dari kekuatan-kekuatan dunia internasional dalam penyelesaian masalah Timor Timur tercermin dalam pola-pola pemungutan suara atas resolusi-resolusi mengenai Timor Timur yang diangkat di Majelis Umum PBB setiap tahun, sejak tahun 1975-1982. Dari pola-pola pemungutan suara tersebut sangat tampak kurangnya komitmen negara-negara tertentu bagi terwujudnya hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemberi-pemberi bantuan Indonesia yang utama, jika mereka tidak menentang, mereka memilih jalan aman dengan cara tidak memberi suara sama sekali (absen). Bahkan Jepang dan AS secara konsisten menentang resolusi-resolusi tersebut.

Pada ke-enam sidang yang pertama, Kanada tidak memberi suara. Lalu, pada ketiga sidang yang terakhir (1980-82), Resolusi Timor Timur malah ditentang oleh Kanada. Kebanyakan negara ME (kecuali Portugal yang secara konsisten mendukung Resolusi Timor Timur) serta beberapa negara Eropa yang lain, secara konsisten tidak memberi suara (Inggris, Perancis, Norwegia, Denmark, Finlandia, Luxembourg, dan Jerman). Untuk ke-empat sidang yang terakhir

(1979-82), draft Resolusi Timor Timur secara konsisten ditentang oleh semua negara ASEAN, sehingga dapat dikatakan telah muncul suatu 'blok ASEAN' dalam penyelesaian masalah Timor Timur. Demikian pula beberapa tetangga Indonesia yang lain seperti Australia, Papua New Guinuea dan Selandia Baru.

Pada tahun 1975, resolusi Timor Timur disyahkan di Dewan Keamanan PBB dengan kesepakatan penuh. Pada tahun 1976, resolusi Timor Timur disyahkan di Majelis Umum dengan 68 suara mendukung, 20 menolak dan 40 absen. Makin lama, dukungan untuk resolusi Timor Timur makin menurun, hingga pada tahun 1982 suara menentang mencapai jumlah 50, dan suara yang mendukung juga hanya sampai 50, sementara 46 suara lainnya absen.

Penurunan dukungan bagi perjuangan penentuan hak bangsa Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri di Majelis Umum dapat dikatakan dikatakan sebagai akibat tidak berhasilnya kampanye diplomatik Portugal. Sejak 1975, Portugal menunjukkan kurangnya ketrampilan mereka dalam bidang diplomatik. Misalnya, Komite Khusus Dekolonisasi PBB tidak pernah diundang oleh Portugal untuk ikut terlibat dalam proses dekolonisasi yang sudah dimulai oleh Portugal pada tahun 1974. Juga aneh bila kedutaan-kedutaan Portugal tidak pernah menyiapkan laporan tentang keadaan Timor Timur untuk pemerintah 'tuan rumah'-nya masing-masing. Menurut Jose Ramos Horta, juru bicara gerakan nasionalis Timor Timur: "walaupun Timor Timur sedang mengalami proses dekolonisasi yang giat dan penuh semangat, tidak ada satu laporan resmi pun tentang wilayah itu dalam arsip-arsip PBB untuk tahun 1974". Hal ini menunjukkan keseganan Portugal untuk menginternasionalisasikan masalah Timor Timur, meskipun mereka sadar akan niat Indonesia untuk melakukan invasi.

Bila masalah Timor Timur diangkat ke tingkat internasional sejak awal, mungkin invasi ABRI dapat dicegah. Rupanya, keseganan Portugal untuk menginternasionalisasikan masalah Timor Timur adalah akibat adanya keinginan kalangan-kalangan tertentu dalam pemerintahan Portugal untuk menyerahkan Timor Timur kepada Indonesia, dengan syarat citra internasional Portugal tetap dipertahankan. Beberapa pejabat tinggi Portugal sulit percaya bahwa rakyat Timor Timur mampu memerintah dirinya sendiri. Ketika Ali Moertopo mengunjungi Lisabon pada bulan Oktober 1974, Presiden Portugal, Costa Gomes, sempat berkomentar bahwa kemerdekaan Timor Timur adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sikap semacam itu jugalah yang dipegang oleh Menteri yang bertanggungjawab atas Dekolonisasi, Almeida Santos.

Pada tahun 1975, Gubernur Portugal serta aparat-aparatnya melarikan diri dari Dili ke Pulau Atauro, untuk menghindari perang sipil antara UDT dan Fretilin. Setelah Fretilin memenangkan perang tersebut, Fretilin meminta agar Gubernur kembali ke Dili untuk menyelesaikan proses dekolonisasi yang diperkirakan akan memakan waktu 5 tahun. Padahal, permintaan ini ditolak oleh Gubernur dan, ketika ABRI melakukan invasi yang mengakibatkan pembunuhan ribuan orang Timor Timur, Gubernur serta aparatnya sedang mendengarkan bunyi tembakan sambil berjemur diri di pasir pantai Atauro.

Keterikatan perhatian Portugal terhadap citra internasionalnya katimbang terhadap kesejahteraan dan hak-hak rakyat Timor Timur, tercermin dari reaksinya terhadap gertakan negara-negara tertentu dalam Sidang Komisi Hak Azazi Manusia PBB pada bulan Maret 1992. Dalam sidang tersebut, Portugal menawarkan suatu resolusi mengenai pembantaian Dili dan masalah Timor Timur pada umumnya, yang disponsori oleh 12 negara ME dan didukung oleh 20 negara lain. Ketika Portugal digertak oleh delegasi- delegasi Australia, AS, Jepang dan Kanada untuk menghapus beberapa butir kunci dari resolusi tersebut, seorang juru bicara Portugal mengatakan bahwa gertakan ini merupakan 'penghinaan' bagi Portugal. Tentu saja, dalam konteks pembantaian, penyidangan, dan penyiksaan orang-orang Timor Timur, komentar semacam itu kurang tepat.

Selama Perang Dunia Kedua, Timor Timur adalah daerah yang sangat strategis, bagi kepentingan Australia. Menurut catatan- catatan sejarah Australia, sepasukan kecil masyarakat Timor Timur di bawah komando Australia telah berjuang melawan tentara Jepang ketika Jepang akan melakukan invasi ke Australia bagian Utara. Perjuangan itu mengakibatikan 40.000 orang Timor Timur terbunuh oleh tentara Jepang. Mengingat hal ini, masyarakat Timor Timur sangat yakin bahwa Australia akan membela haknya untuk menentukan nasib sendiri dan mendesak agar proses dekolonisasi segera dimulai di bawah kewibawaan PBB.

Namun, pada akhirnya, rakyat Timor Timur dikhianati oleh pemerintah Australia. Pengkhianatan pemerintah Australia terhadap Timor Timur dimulai ketika Gough Whitlam menjadi Perdana Menteri. Whitlamlah yang memelopori 'diplomasi batiknya' Australia, sebagai usaha untuk membuka lebar-lebar peluang perdagangan Australia di Asia Tenggara dan, dengan demikian, mencabut ikatan-ikatan tradisionalnya pada Eropa, terutama Inggris. Sebelum invasi, Whitlam sempat mengunjungi Indonesia pada tahun 1974, dan dalam sebuah pertemuan dengan Suharto di Yogya, ia mengatakan bahwa dia merasa Timor Timur sebaiknya dijadikan bagian dari Indonesia. Tentang hal ini, Whitlam, yang dikenal sebagai pahlawan progresif Australia, tidak pernah berkonsultasi dengan kabinetnya.

Di bawah PM Hawke, Menteri Luar Negeri Hayden memainkan peranan untuk dirinya sebagai pahlawan 'prakarsa-prakarsa perdamaian' di Indocina (Kamboja), sambil melayani pemerintah Indonesia dengan tetap berdiam diri terhadap perang rahasia tentara Indonesia di Timor Timur. Di bawah Hawke pula pemerintah Australia mengakui secara *de jure* aneksasi Timor Timur, sebagai langkah pertama dalam pembagian cadangan minyak di Celah Timor. Tentu saja, Persetujuan Whitlam terhadap invasi Timor Timur dan suara penentangan Australia terhadap Resolusi Timor Timur di Majelis Umum (1979-1982) didasarkan atas kepentingan pada potensi cadangan minyak tersebut serta niat Australia untuk mengeksploitasinya.

Keterlibatan pemerintah Australia, dan penolakannya untuk mengambil prakarsa bagi terlaksananya resolusi PBB mengenai persoalan Timor Timur, adalah pelanggaran asas *self-determination*: hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Walupun pembantaian Dili dikutuk secara aktif oleh pers dan masyarakat sipil Australia, darah yang tumpah di Santa Cruz masih basah ketika Menteri Keuangan Australia mengunjungi Jakarta untuk membuat perjanjian-perjanjian perdagangan yang baru. Sekelompok tentara Indonesia sampai sekarang masih sedang disekolahkan di Akademi Militer Australia, sebagai bagian dari suatu proyek kerjasama pertahanan Australia- Indonesia. Baru-baru ini, PM Keating menunjukkan niatnya untuk meneruskan tradisi 'diplomasi batik' yang dipelopori oleh Whitlam. Sebelum kedatangannya ke Jakarta, Keating mengumumkan bahwa kerjasama ekonomi yang baru tidak akan dikaitkan dengan dengan masalah Hak Azazi Manusia. Pendirian pemerintah Australia ini diulangi kembali oleh Menteri Luar Negeri Evans yang mengecam keputusan Kongres AS mengurangi bantuan militer ke Indonesia sehubungan dengan terjadinya pembantaian Dili. Evans mengatakan pemerintah Australia tidak akan menyusul jejak AS dengan mengaitkan bantuan dengan persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Dokumen-dokumen CIA yang beredar sebelum invasi membuktikan bahwa pemerintah AS sadar akan niat Indonesia untuk melakukan invasi dan, dengan sengaja, berusaha agar invasi tersebut tidak segera dicegah. Komentar Dubes AS di Jakarta berbunyi: "Jika Indonesia melakukan invasi, AS sangat mengharapkan agar hal ini dilakukan secepatnya, seefektif mungkin dan asal peralatan perang yang berasal dari kami tidak dipakai". Walaupun demikina, As sangat sadar juga bahwa Indonesia tidak bisa tidak memakai peralatan yang diperoleh dari Amerika, yang disalurkan selama ini melalui beberapa program militer AS-Indonesia, termasuk Program Bantuan Militer (Militery Aid Program: MAP), Program Penjualan Peralatan Militer ke Luar Negeri (Foreign Military Sales: FMS), dan Program Pelatihan Pendidikan Militer Internasional (International Military Education and Training: IMET).

Pada tahun 1976, Presiden Carter dipilih sebagai Presiden AS dan sampai sekarang masih dikenang sebagai pahlawan Hak Azazi Manusia karena "Kebijakan Luar Negerinya Yang Berprikemanusiaan". Apakah bukan hal yang ironis bila pada tahun 1978, masih di bawah Carter, bantuan militer AS ke Indonesia meningkat dua kali lipat, dengan tawaran beberapa senjata baru, termasuk pesawat-pesawat tempur AV-10 Bronco dan pesawat Skyhawke I: dua senjata kunci dalam operasi tempur ABRI di Timor Timur.

Sama seperti Australia, AS pernah mengakui secara *de jure* aneksasi Indonesia atas Timor Timur. Rupanya AS takut bila Timor Timur merdeka, aksesnya ke kawasan perairan laut strategis di sekitar pulau Timor, akan dibatasi. Ketakutan ini yang melatarbelakangi persetujuan AS kepada invasi dan pendudukan Indonesia di Timor Timur. Apalagi, invasi itu dilakukan oleh suatu rezim yang didukung oleh modal dan senjata dunia kapitalis, yang juga terjadi dalam konteks di mana teori domino adalah teori yang paling menentukan kebijakan luar negeri Amerika. Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa kepentingan utama kebijakan AS di Asia Tenggara adalah untuk membasmi komunisme, suatu negara Timor Timur merdeka dengan pemerintahan yang berpegang pada asas-asas ketidakberpihakan, jelas dianggap sebagai ancaman terhadap rencana AS untuk mempertahankan Asia Tenggara sebagai sumber bahan mentah bagi Eropa dan AS.

Kekhawatiran bagi negara-negara tertentu bahwa kemerdekaan Timor Timur dapat mendestabilisasikan keseimbangan politik kawasan Asia Tenggara, adalah ketakutan yang tidak berdasar. Baru-baru ini, gerakan nasionalis Timor Timur telah mengajukan beberapa usulan, baik kepada Indonesia maupun dunia internasional, menuju perdamaian di Timor Timur. Pada tahun 1991, Xanana Gusmao telah mengulangi kembali desakannya untuk memulai pembicaraan meja bundar antara Portugal, Indonesia dan gerakan nasionalis Timor Timur, di bawah pengawasan PBB dan tanpa syarat. Dalam beberapa artikel yang terbit di media pers Australia setelah pembantaian Dili, Jose Ramos Horta telah mengatakan bahwa Indonesia dan tetangga-tetangganya tidak perlu merasa takut terhadap Timor Timur merdeka. Sebab, bila Timor Timur mencapai kemerdekaannya, pemerintah Republiknya akan:

1. Melamar untuk menjadi anggota ASEAN dan Forum Pasifik Selatan.
2. Menghormati batasan-batasan RI dan tidak menyiapkan pasukan- pasukan yang bermusuhan terhadap Indonesia atau negara-negara lain.
3. Mengakui hak warga Indonesia untuk tetap menetap di Timor Timur, dan menghargai harta bendanya.
4. Menjamin penetapan perjanjian Celah Timor seraya menantikan suatu penyelesaian yang tuntas. Pada umumnya, inti perjanjian tersebut akan diterima oleh suatu pemerintah Republik Timor Timur.
5. Mengundang Australia untuk ikut terlibat dalam masa depan Timor Timur

Namun begitu, jaminan-jaminan dari gerakan nasionalis Timor Timur itu tidak berhasil meyakinkan kekuatan-kekuatan dunia untuk secara aktif mengusahakan penyelesaian masalah Timor Timur. Padahal dengan mengambil peranan dalam penyelesaian masalah Timor Timur ini, bisa saja, negara-negara seperti Australia dapat memperbaiki citranya dalam dunia diplomasi internasional. Di samping itu juga, pujian-pujian beberapa negara terhadap laporan KPN (Komisi Penyelidik Nasional), telah ikut menumpulkan kecaman- kecaman tajam terhadap pembantaian Dili. Padahal pujian-pujian tersebut, yang hanya didasarkan pada jumlah korban KPN (50) yang melewati jumlah resmi ABRI (19), sama sekali tidak tepat, selain juga kesimpulan-kesimpulan sepihak lainnya yang diambil dalam laporan KPN mengenai keterlibatan Fretilin di balik pembantaian Dili. Dan karena itu, penyelidikan KPN ini, dari segi metode penyelidikannya, dapat dikatakan tidak absah karena sangat menceng (bias) dan tidak profesional.

Keseganan dari beberapa negara, meskipun mengecam prilaku ABRI pada peristiwa 12 November, untuk mendukung sepenuhnya penentuan nasib sendiri di Timor Timur, terlihat di Sidang Komisi Hak Azazi Manusia PBB yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan Februari- Maret 1992. Dalam Sidang tersebut, suatu rancangan resolusi mengenai masalah Timor Timur diajukan oleh Portugal dengan disponsori oleh ke-12 negara ME serta 20 negara lain. Resolusi tersebut menyatakan "keprihatinan yang serius" dari negara-negara penandatangan terhadap kekejaman ABRI yang bertindak secara sepihak pada peristiwa 12 November di Dili. Rancangan resolusi itu juga menyambut baik usaha-usaha pemerintah Indonesia untuk menghadapi dan membetulkan masalahnya, tetapi juga menyebut "prinsip-prinsip PBB mengenai Pencegahan Efektif dan Penyelidikan Pembunuhan yang Sewenang-wenang dan di Luar Hukum". Prinsip-prinsip ini menggambarkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar suatu penyelidikan dapat dianggap lengkap dan independen. Rancangan resolusi itu memang mendapat dukungan dari kebanyakan negara anggota Komisi. Bila saja rancangan tersebut dapat disyahkan oleh Komisi sebagai suatu Resolusi, maka sudah pasti dapat dimasukkan ke dalam agenda Komisi Dekolonisasi PBB. Dengan demikian, langkah-langkah yang lebih konkrit dapat segera diambil oleh PBB untuk menjamin upaya penentuan nasib sendiri di Timor Timur.

Namun demikian, prakarsa-prakarsa perdamaian gerakan nasionalis Timor Timur, pada kenyataannya, harus berhadapan dengan kampanye diplomatik Indonesia, terutama diplomasi dagangnya. Karena nampaknya, kekuatan-kekuatan internasional sangat berkepentingan dengan hubungan dagang mereka dengan Indonesia, untuk mana mereka harus berpikir dua kali untuk mendukung sepenuhnya perjuangan penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur.

Sejak 1975, kedutaan-kedutaan besar negara-negara asing di Indonesia telah memprioritaskan masalah Timor Timur dengan strategi "dagang" tersebut. Misi-misi perdagangan internasional yang mengunjungi Jakarta tidak pernah bebas dari gertakan- gertakan pemerintah Indonesia untuk mendukung sikapnya terhadap Masalah Timor Timur di PBB. Oleh misi Indonesia di New York, misalnya, sering diadakan 'pesta minum-minuman' untuk diplomat- diplomat tertentu dengan tujuan mewajibkan mereka untuk mendukung Indonesia. Di PBB sendiri, utusan-utusan internasional diancam atau bahkan disogok agar mendukung Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang mengecam usaha beberapa negara untuk mengkaitkan pencairan bantuannya dengan masalah politik sebagai imperialisme, dengan segala bentuk metode-metode diplomatiknya, sebetulnya dapat dikatakan adalah sikap yang sangat munafik. Absennya Norwegia dan Swedia serta Kanada yang tidak memberikan suara terhadap resolusi Timor Timur di PBB, lebih disebabkan oleh ancaman pemerintah Indonesia yang akan memutuskan hubungan perdagangan mereka bila rancangan resolusi Timor Timur itu mereka didukung.❐

Famine victims, 1979

photo: Sydney Morning Herald

Lampiran I:

USULAN PERDAMAIAN XANANA GUSMAO Menuju Perdamaian Timor Timur Di Tahun 90-an

Pada bulan Mei 1992, CNRM (*Concelho Nacional de Resistencia Maubere* : Dewan Nasional Pertahanan Maubere), organisasi payung yang mewakili kepentingan masyarakat Timor Timur baik di luar maupun di dalam Timor Timur, melontarkan suatu rangkaian usulan baru bagi perdamaian di Timor Timur. Usulan tersebut, yang diserahkan oleh juru bicara CNRM Jose Ramos Horta, kepada pejabat-pejabat tinggi sekretariat PBB di New York, berbunyi sebagai berikut:

Negosiasi Tanpa Syarat Di Bawah Naungan PBB

Xanana Gusmao, Pemimpin perlawanan Timor Timur, mengusulkan dan tetap siap untuk memasuki proses dialog dengan pejabat- pejabat Indonesia, di bawah naungan PBB, tanpa syarat, untuk menjajagi segala kemingkinan menuju penyelesaian tuntas bagi masalah Timor Timur. Usulan perdamaian yang diajukan Xanana Gusmao, pemimpin perlawanan, mewakili posisi semua bagian masyarakat Timor Timur di dalam maupun di luar Timor Timur, dan juga posisi Gereja Katolik. Pemerintah Portugal telah memberi dukungannya bagi usulan perdamaian ini dan menyerahkan usulan ini kepada Sekretaris Jendral PBB pada bulan Januari. Proses ini akan meliputi tiga tahap.

Tahap Pertama: SATU SAMPAI DUA TAHUN

Para pejabat Portugal dan Indonesia sebaiknya mengadakan perundingan secepat-cepatnya, di bawah naungan Sekretaris Jendral PBB. Hal ini tidak membutuhkan keterlibatan langsung dari Timor Timur.

Untuk tahap pertama, kami mengusulkan suatu versi yang telah disempurnakan dari *proximity talks* yang diterapkan dalam kasus Afghanistan di mana, karena penolakan Pakistan untuk duduk berhadapan muka dengan pemerintah Kabul, PBB berlaku sebagai 'perantara'. Hal ini dapat mengatasi posisi Indonesia saat ini yang menolak berunding langsung dengan pihak Timor Timur.

Tahap perundingan ini harus berhasil mencapai:

- Penghentian secepat mungkin segala bentuk kegiatan bersenjata di Timor Timur;
- Pembebasan semua tahanan politik Timor Timur secepat mugkin dan tanpa syarat;
- Penyusutan personil militer Indonesia di Timor Timur dari jumlah saat ini yang diperkirakan 20.000 - 30.000 orang menjadi 1.000 orang dalam waktu enam bulan;
- Pemindahan dari Timor Timur semua senjata berat (tank, helikopter, pesawat tempur, persenjataan artileri jarak jauh);
- Penyusutan sebesar 50 persen dari pegawai negeri Indonesia di Timor Timur;
- Perluasan kehadiran dan kegiatan Palang Merah Internasional memasuki setiap wilayah Timor Timur dan dengan ketaatan ketat pada Konvensi Jenewa;

Akses ke Wilayah (Timor Timur) oleh badan-badan PBB seperti UNICEF, UNDP, WHO, FAO, dsb., dengan tujuan menjalankan, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, program-program komprehensif menyangkut:

- Pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup;
- Pemindahan kembali secara sukarela puluhan ribu rakyat Timor Timur yang telah diusir dari tanah nenek-moyangnya;
- Proyek-proyek pembangunan di setiap wilayah;
- Perawatan yang layak bagi wanita dan anak-anak;
- Kampanye imunisasi.

Penyelenggaraan sensus menyeluruh bagi penduduk oleh badan-badan PBB yang memiliki kemampuan itu, sebagai salah satu prasyarat bagi pelaksanaan yang efektif dari proyek-proyek yang telah disebutkan di atas;

- Pendirian suatu Komisi Hak Asasi Manusia di Dili, diketuai oleh Uskup, terdiri dari sejumlah orang Timor Timur pilihannya dan dengan bantuan dari lembaga-lembaga hak asasi Indonesia yang ternama dan Pusat Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Komisi ini akan melapor langsung kepada Kepala Negara Indonesia dan Pemerintah Portugal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jendral PBB, Pusat Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa yang akan mendistribusi- kannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Laporan-laporan ini dapat disediakan untuk lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat umum;
- Pencabutan sensor terhadap pers;
- Kebebasan bagi kegiatan dan perkumpulan politik;
- Penghentian peraturan-peraturan yang membatasi dan menghalangi penyebaran, pengajaran bahasa Portugis dan sekolas-sekolah Portugis;

Pengangkatan, oleh Sekretaris Jendral PBB, seorang Wakil Tetap yang bertanggung jawab atas semua kegiatan PBB di Timor Timur, termasuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan dari persetujuan yang telah dicapai.

Tahap Kedua: LIMA TAHUN

Tahap pertama adalah syarat bagi normalisasi bertahap ataupun pelaksanaan Tahap Kedua ini. Pada akhir Tahap Pertama:

- Portugal dan Indonesia mengadakan normalisasi hubungan;
- Partai-partai politik disyahkan;
- Portugal diwakili di Timor Timur oleh kedutaan Masyarakat Eropa dengan didampingi oleh seorang pejabat menetap Portugal;
- Institut Kebudayaan Portugis dibangun dengan dana dari Yayasan Gulbenkian, Fundacao Oriente dan ME;
- Pemilihan umum diselenggarakan untuk Majelis lokal. Proses dan Prosedur pemilihan umum harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diakui di seluruh dunia. PBB akan menyediakan bantuan teknis dan supervisi untuk pemilihan umum;

- Hanya orang-orang yang diakui sebagai bangsa Timor Timurlah yang akan memilih dan mempunyai hak memilih;
- Majelis yang terpilih secara demokratis memilih Gubernur Wila yah yang harus berbangsa Timor Timur;
- Majelis dan Gubernur mendapatkan mandat untuk jangka waktu lima tahun;
- Wilayah Timor Timur dapat menyelenggarakan hubungan dagang dengan negara-negara lain, menyebarluaskan semua peraturan- peraturan yang menyangkut investasi, pemilikan tanah, pemilikan, dsb.;
- Tentara Indonesia yang masih tinggal ditarik kembali dalam waktu tiga bulan. Wilayah ini tidak akan punya angkatan bersenjata. Polisi wilayah akan diorganisir oleh PBB dan berada di bawah kekuasaan Gubernur terpilih;
- Wilayah (Timor Timur) akan mempunyai peraturan-peraturan imi grasi sendiri;

Penyusutan lebih lanjut dari pegawai-pegawai negeri Indonesia.

Tahap Ketiga: *PENENTUAN NASIB SENDIRI*

Tahap Kedua dapat diperpanjang atas dasar persetujuan bersama. Diperlukan dua-per-tiga dari suara Majelis yang mendukung perpanjangan Tahap Kedua agar usulan dapat diajukan untuk referendum.

Jikalau referendum menolak perpanjangan Tahap Kedua, maka Tahap Ketiga dimulai.

Jikalau Majelis gagal untuk membuat rekomendasi untuk perpanjangan Tahap Kedua, maka Tahap tersebut akan berjalan sampai dengan tiga tahun, sementara perundingan dengan Pemerintah Indonesia berjalan.

Jikalau referendum memilih perpanjangan Tahap Kedua atau pada penerapan kedua dari Tahap Kedua, apapun jadinya, Tahap Ketiga akan meliputi:

- Persiapan referendum mengenai penentuan nasib sendiri yang diikuti oleh pemilihan umum untuk Majelis Konstituante yang diadakan dalam waktu satu tahun;
- Pemindahan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih;
- Pemimpin-pemimpin politik Timor Timur membentuk pemerintahan Kesatuan Nasional;

- Timor Timur dinyatakan sebagai Zona Perdamaian dan Netral yang dijamin oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan dan ASEAN;
- Timor Timur menjadi anggota ASEAN dan Forum Pasifik Selatan;

Timor Timur menyetujui dan meratifikasi semua sarana-sarana hak asasi manusia internasional.

Beberapa hari setelah pengumumannya, pemerintah Indonesia menolak usulan tersebut pemerintah Indonesia. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri mangatakan sikap Indonesia, di mana pemerintah Indonesia rela untuk memulai kembali perundingan dengan Portugal, jika perundingan tersebut tetap diadakan atas syarat-syarat yang telah diputuskan kedua pihak pada tahun 1983, dan syarat-syarat baru tidak akan diterima oleh pemerintah Indonesia.

Mengikuti jejak rekannya, Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan bahwa usulan Xanana tidak dapat diterima oleh pemerintah Australia. Sebabnya, usulan tersebut bukan hanya usaha rekonsiliasi, di mana Timor Timur akan tetap di bawah naungan kedaulatan R.I. Tetapi, menurut usulan baru ini, persoalan kedaulatan Timor Timur kelak akan ditentukan oleh keinginan rakyat Timor Timur melalui referendum. Maka, pemerintah Australia, yang mengakui Timor Timur sebagai provinsi ke-27 R.I., tidak dapat memberi dukungan kepada usulan tersebut.

Usulan Xanana juga belum ditanggapi oleh ASEAN, walaupun pihak pertahanan Timor Timur sudah menunjukkan kesanggupannya untuk menjadi anggota ASEAN. Sikap diam negara-negara anggota ASEAN (termasuk pemerintah Malaysia yang salah seorang warga negaranya telah menjadi korban tentara pada pembantaian Santa Cruz), sama sekali tidak konsisten dengan konsep TAC (*Treaty of Amity and Co-operation*) yang terkandung dalam ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*), suatu persetujuan antar negara anggota ASEAN yang ditandatangani pada tahun 1971. Intinya, TAC adalah penyelesaian perselisihan antar negara secara damai.

Walaupun demikian, kebisuan negara-negara ASEAN mengenai intervensi ABRI di Timor Timur tetap. Padahal, konteks kawasan sekarang adalah sangat tepat bagi dimulainya perundingan mengenai penyelesaian masalah Timor Timur. Kawasan ini sedang mengalami beberapa perubahan, sehingga dapat juga meng- akomodasi perobahan dalam status Timor Timur. Perobahan- perobahan tersebut ditandai oleh mundurnya pangkalan AS dari Filipina, penyelesaian perang di Kamboja, perundingan mengenai perselisihan hak milik kepulauan Spratly, perobahan-perobahan ekonomi dalam negara-negara Indocina sehingga lebih terbuka kepada pasar internasional, serta pembahasan pada tingkat ASEAN mengenai konsep-konsep blok perdagangan baru di kawasan ini, baik AEAC-nya Mahathir maupun APEC-nya pemerintah AS. Artinya, kawasan ini sedang dalam keadaan yang sangat dinamis, yang sangat dapat dimanfaatkan bagi dimulainya perundingan tentang penyelesaian masalah Timor Timur.❑

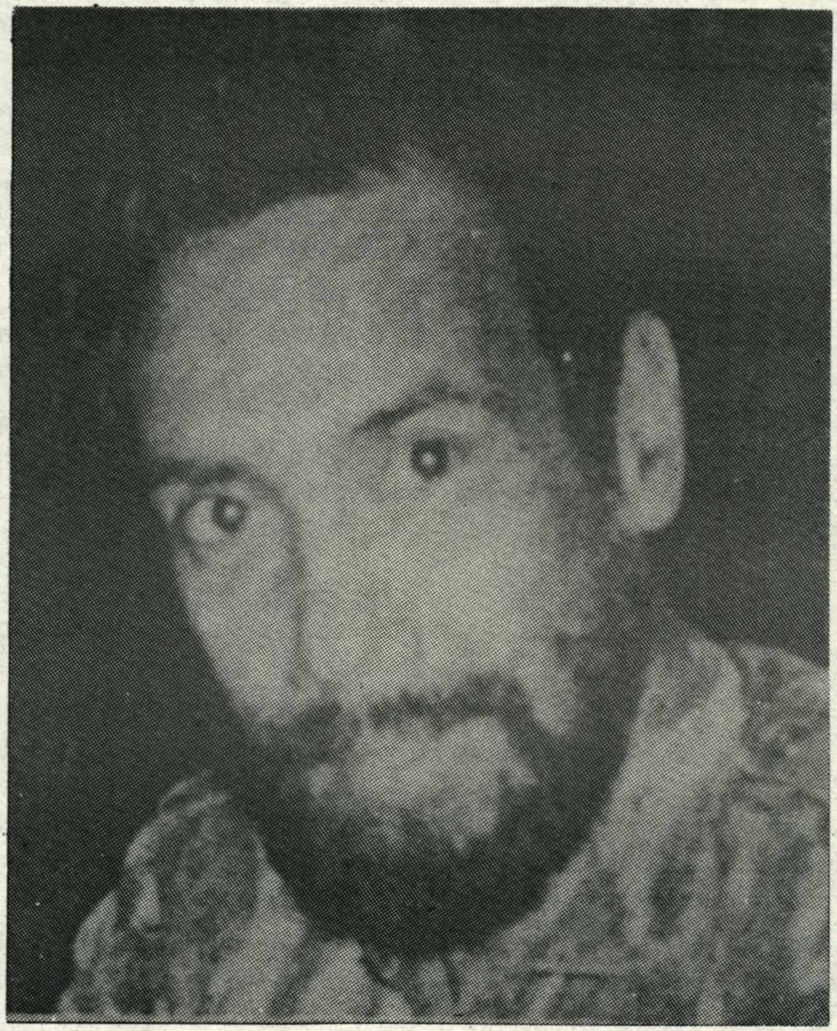

Lampiran II:

PIDATO & RINGKASAN PEMBELAAN (PLEDOI) XANANA GUSMAO

Berikut ini adalah ringkasan pidato pembelaan (Pledoi) Xanana Gusmao yang 28 halaman tebalnya. Pidato pembelaan ini ditulis dengan tangan, berbahasa Portugis dan telah disampaikannya di hadapan Sidang Pengadilan Negeri Dili pada tanggal 17 Mei 1993. Sesudah Xanana membacakan pidato pembelaannya sebanyak 2 halaman pertama, pengadilan memerintahkannya untuk berhenti membaca.

Terjemahan dalam bahasa Inggeris dilakukan oleh TAPOL (Indonesia Human Rights Campaign, di London), dan baru dapat diperoleh oleh pers dan pihak lainnya pada tanggal 21 Mei 1993.

[Halaman asli dari pidato pembelaan ini, sebagaimana ia diterima TAPOL, tidak jelas urutan halamannya. Penomoran halaman yang digunakan pada naskah terjemahan ini hanyalah untuk memudahkan pembaca]

⁂

"Pertama-tama saya ingin berterimakasih pada Tuan Hakim yang telah memberi saya kesempatan menyatakan pendapat saya secara bebas, tanpa paksaan kekerasan apapun.

Saya selalu menegaskan dalam semua pembicaraan saya dengan siapapun, termasuk pembicaraan saya dengan Duta Besar Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa dikarenakan keadaan- keadaan yang mengitari saya ketika mengeluarkan pernyataan- pernyataan di Jakarta, maka pernyataan-pernyataan saya itu tidak dapat dipercaya kebenarannya.

Pada Sidang inilah, waktu yang cocok bagi saya untuk menjelaskan segala-galanya. Saya harap kaum intelektual Indonesia bersedia memahami kerangka pemikiran saya saat ini, di mana saya memanfaatkan kemerdekaan berpendapat saya, sebagai akibat dari adanya sejumlah hak yang ada pada saya.

Saya harap generasi Indonesia yang baru, atau untuk lebih tepatnya, para pemuda Indonesia, bersedia memahami betapa pentingnya hukum kebebasan menyatakan pendapat, baik sebagai aspek fundamental di dalam kehidupan manusia hari ini, maupun sebagai bagian dari kehidupan masyarakat modern di mana kita hidup.

Akhirnya saya berharap agar masyarakat internasional bersedia memahami nilai yang sesungguhnya dari semua pernyataan saya dengan memperhitungkan waktu dan tempat di mana pernyataan itu saya buat.

Sekali lagi saya berterimakasih pada Tuan Hakim yang mulia yang telah mengizinkan saya membacakan pembelaan diri saya ini.

Saya adalah Xanana Gusmao, Panglima Falintil dan Pemimpin dari Gerakan Perlawanan Maubere terhadap invasi pengecut dan memalukan, oleh tentara Indonesia, pada 7 Desember 1975 yang telah menduduki Timor Timur secara kriminal dan ilegal untuk selama 17 tahun terakhir.

Pada tanggal 22 Nopember tahun lalu di Denpasar, saya telah menandatangani sebuah dokumen di mana saya membenarkan bahwa menurut hukum internasional, maka saya ini tetap, seperti juga semua orang Timor, adalah warganegara Portugis, sebelum adanya kesadaran bahwa saya adalah penduduk dan warga Timor Timur.

Karena ketentuan dan persyaratan hukum demikianlah maka saya menolak adanya wewenang pengadilan Indonesia mengadili saya, khususnya pengadilan ini yang lahir dari paksaan kekuatan senjata dan tindak kriminal terhadap tanah air dan kampung halaman saya, Timor Timur.

Saya percaya pers internasional tidak akan tidak mencatat gerakan-gerakan politik besar yang telah terjadi. Namun seandainya ada yang tidak tercatat, saya kini ingin meminta perhatian setiap orang, bahwa pada kenyataannyalah saya sekarang merasa sebagai orang asing di negeri saya sendiri. Di tempat tahanan POLWIL (Komando Polisi Wilayah) saya sepenuhnya dipagari oleh orang-orang Indonesia; yaitu para perwira BAIS (Badan Intelijen Strategis --Tentara Indonesia--) dan yang menjaga saya dengan ketat adalah para anggota pasukan KOPASSUS (pasukan elit Indonesia berbaret merah). Ketika saya meminta kunjungan seorang Bishop, mereka justru mengutus seorang pendeta India yang membela integrasi.

Di sini, di sidang yang dinamakan pengadilan ini, yang saya lihat hanyalah orang Indonesia. Terutama tentara Indonesia dari KOPASSUS dan BAIS. Padahal menurut hukum Indonesia sendiri, peradilan seperti yang dilakukan terhadap saya ini, haruslah diselenggarakan secara terbuka untuk umum. Setiap kali saya memasuki ruang pengadilan, hadirin yang saya lihat hanyalah para pejabat tentara yang sama. Beberapa dari mereka adalah pelaku utama dalam kasus saya hingga sampai pada penahanan saya. Orang- orang Timor, kawan-kawan seperjuangan saya berada di luar di jalanan di bawah pengawasan ketat. Di sini hukum tentara pendudukan itu digelar secara terang-terangan. Inilah wajah dari sebuah penindasan asing, sebuah penaklukan asing yang memamerkan keangkuhan penjajahan yang menjijikkan.

Yang menjadi pertanyaan orang Timor Timur sekarang adalah masalah tanggungjawab masyarakat internasional dan perihal kedudukan hukum internasional di Indonesia. Ini adalah sebuah kasus di mana prinsip-prinsip universal sedang dipertaruhkan. Sebuah kasus di mana norma-norma dekolonisasi dari PBB telah dimanipulasi dan diperdayakan. Sebuah kasus di mana Indonesia telah tidak menghiraukan resolusi-resolusi PBB dan karenanya ini adalah kasus pelanggaran menyolok dan terbuka terhadap prinsip-prinsip Gerakan Non Blok, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan universal dari hukum, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan rasa keadilan manusia.

Setiap orang Indonesia terikat pada kebijaksanaan dari bangsanya sendiri. Sehingga pengertian mereka tentang Timor Timur adalah produk dari bagaimana pemerintah mereka melihatnya. Kecuali jika mereka mendengarkan kata-hati-nuraninya sendiri dan menyatakan hubungan batin mereka pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan dan rule of law.

Selama 17 tahun, Timor Timur hanya diperlihatkan sebagai sebuah sisi saja dari suatu mata uang logam. Dan itu adalah kisah palsu dari suatu kebesaran Indonesia. Sudah hampir empat bulan lamanya saya telah dimanfaatkan bagi pertunjukan lelucon palsu yang memalukan itu. Apakah itu dilakukan dengan akal sehat atau merupakan sesuatu yang tak menyenangkan, tidak terletak pada saya untuk menilainya.

Pengadilan ini menuntut saya karena melakukan tindak kriminal terhadap negara Indonesia dan pemilikan senjata secara tidak syah. Saya tahu bahwa segala sesuatu telah diatur demikian rupa sehingga saya tinggal membayar saja....

Padahal tertuduh yang pertama-tama seharusnya berdiri di hadapan mahkamah internasional, adalah :

- Pemerintah Republik Indonesia karena perilaku tindak kriminal yang ia lakukan selama 17 tahun di Timor Timur;
- Pemerintah Amerika Serikat yang telah menyalakan lampu hijau untuk invasi pada tanggal 7 Desember 1975 dan yang semenjak itu telah memberi bantuan militer dan politik kepada aksi-aksi penumpasan Indonesia di Timor Timur;
- Para pemerintahan Australia dan Eropa Barat karena keterlibatan politik mereka membantu Indonesia;

Dan akhirnya, pemerintahan Portugis karena benar-benar telah tidak bertanggung jawab di dalam mendekolonisasi Timor Timur.

Perserikatan Bangsa-Bangsa diakui sebagai lembaga yang secara sah punya segala alat untuk menentang kehadiran penjajahan di manapun di dunia, di mana rakyat berjuang demi kemerdekaannya. Perjuangan saya dan perlawanan rakyat saya bersama Falintil (angkatan bersenjata dari gerakan perlawanan rakyat Timor Timur dan CNRM --the National Council of Maubere Resistance--[Dewan Nasional Gerakan Perlawanan Maubere], hendaknya ditempatkan di dalam konteks ini. Semua gerakan dan lembaga itu berdiri di atas atau berada di luar hukum Indonesia.

Tuan Soedjono (pembela terdakwa. Pen.) di dalam eksepsinya telah mencoba untuk menerima posisi yang lebih liberal, ketika ia mempermasalahkan "Deklarasi Balibo". Tapi ia tidak sampai pada permasalahan yang lebih fundamental ---yaitu, ilegalitas atau tidak sahnya aneksasi Timor Timur melalui cara-cara kekerasan. Maka itu masalah kunci dari peradilan ini adalah apa yang dinamakan "proses integrasi dari Timor Timur".

Saya di sini mengingatkan Tuan-Tuan bahwa di Denpasar saya telah dipaksa untuk membuat pernyataan minta maaf kepada tentara Indonesia atas peristiwa pembantaian di Santa Cruz, sebuah pembantaian yang sesungguhnya telah dilakukan oleh tentara Indonesia dan bukan oleh saya. Saya mengingatkan Tuan-Tuan bahwa yang demikian juga terjadi dengan pernyataan saya yang di Jakarta, dan dengan ini saya nyatakan bahwa pernyataan Jakarta saya yang menyatakan saya bersedia menyerah itu, dibuat atas perintah khusus dari gubernur boneka, Abilio Osorio.

Pengadilan tentu harus sepakat dengan saya bahwa ada hal yang telah berjalan terlalu jauh dengan mengatakan bahwa Fretelin "berani memaksakan kemauannya atas nama rakyat" dan bahwa apa yang dikatakan sebelumnya sebagai proklamasi Bali Beach ("Deklarasi Balibo") yang diakui ditandatangani di Balibo, Timor Timur, oleh beberapa orang Timor pada 30 Nopemeber 1975, sesungguhnya ditandatangani di Bali, Indonesia, yaitu di Hotel Bali Beach, telah menyatakan kehendak yang sesungguhnya dari rakyat Timor Timur. Pengadilan telah meniadakan unsur politik yang justru akan memberikan keabsahan hukum dari Deklarasi itu, yaitu hal yang dituntut setiap orang: terwakilinya kehendak mayoritas dari rakyat. Ini merupakan conditio sine quanon, mau tidak mau harus ada.

Sampai saat ini, PBB tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur yang telah ditegakkan secara paksa dengan menggunakan kekuatan bersenjata, melalui aksi-aksi kekerasan dan penyangkalan sistematis atas hak-hak manusia yang paling mendasar.

Pengadilan ini telah menyebut tanggal 17 Desember 1975 sebagai hari pembentukan pemerintahan sementara dan dewan setempat. Dan karena semua orang Indonesia telah lupa, maka adalah kewajiban saya di sini mengingatkan orang pada hari yang tragis, tanggal 7 Desember di tahun yang sama. Tanggal 7 Desember adalah hari kesaksian atas invasi Indonesia yang pengecut dan memalukan. Hari di mana pasukan tentara Indonesia tanpa pilah-pilih dan pandang bulu membantai penduduk Dili yang tanpa daya pertahanan. Hari yang menyebabkan ribuan orang mati di kalangan orang tua-tua, perempuan dan kanak-kanak, termasuk seorang wartawan Australia.

Sementara pernyataan Balibo telah ditandatangani dengan darah keempat Wartawan Australia yang dibunuh tentara Indonesia dalam serangannya terhadap desa Balibo, maka yang apa dinamakan pemerintahan sementara itu telah dibentuk di atas timbunan mayat pembantaian rakyat Timor Timur yang dilakukan antara tanggal 7 dan 17 Desember tahun 1975 itu. Pemerintahan itu yang telah didirikan dengan akompanyemen deru laut dan porak porandanya tanah oleh ledakan senjata yang menimpa penduduk yang tak berdaya. Pemerintahan itu didirikan di tengah-tengah gemuruhnya tembakan meriam dan tank-tank yang berlarian maju ke tengah- tengah penduduk di kampung halamannya sendiri. Dapatkah pendirian pemerintah yang demikian mengaku dan menganggap dirinya sah secara hukum ? Pada pendapat saya, pendirian demikian sama dengan serbuan tentara Irak di

Kuwait, sama dengan serbuan tentara Rusia ke Kabul dan berwatak sama dengan invasi orang-orang Vietnam ke Kamboja.

Pengadilan mengatakan bahwa Fretelin menentang diselenggarakannya referendum, karena khawatir kalau-kalau rakyat Timor-Timur memihak integrasi. Padahal dengan mengutip apa yang dinamakan petisi, pengadilan mengatakan bahwa Arnaldo de Araujo, Guilherme Ganvaves dan presiden Jenderal Soeharto yang telah meyakinkan Parlemen untuk menyetujui begitu saja integrasi yang tergesa-gesa itu, tanpa suatu referendum apapun jua. Lalu, siapa yang telah tidak menghendaki adanya referendum? Fretelin ataukah Indonesia?

Atas nama rakyat yang mana, apa yang dinamakan petisi itu ditandatangani? Kini, pemerintah Indonesia dapat pamer pada dunia bahwa ia secara de fakto mengontrol wilayah Timor-Timur. Kini ia mengaku tengah membangun wilayah yang didudukinya, dan bersamaan dengan itu mengutuk penjajahan yang lainnya, Portugis yang tidak mampu berbuat demikian. Justru karena Portugis telah gagal untuk membangun Timor-Timur dalam empat ratus tahun, maka kini apakah kami orang Timor-Timur yang harus membayar kesalahan dari penjajah yang satu ini, di samping apakah kami juga harus membayar tindak dan perilaku kriminal dari penjajah lainnya?

Kebohongan Orang Indonesia

Saya telah banyak dikuliahi mengenai ketertinggalan kolonialisme Portugis, seakan-akan saya ini tidak pernah hidup di bawah kolonialisme itu. Mereka ingin memameri saya dengan pembangunan di Timor-Timur. Pembangunan itu dianggap sebagai suatu permasalahan statistik saja ketika mereka membandingkannya dengan apa yang telah dibuat Portugis selama jaman penjajahannya. Saya semestinya bertanya apakah kolonialisme itu dapat dikuantifikasi sebagai baik dan buruk ?

Saya pernah berurusan dengan seorang perwira asal Irian Jaya yang mengatakan kepada saya betapa besarnya rumpun keluarga bangsa Indonesia itu. Tapi saya jatuh muak dengan keterangan perwira itu. Saya ketemu seorang Sumatra, penterjemah dari BAIS yang bicara bahasa Portugis yang kerjanya tidak lain hanya memuji-muji saudara Jawanya. Saya merasa akan muntah karenanya. Saya ketemu dengan seorang perwira asal Sulawesi yang mengatakan pada saya perihal "ukuran-ukuran" Indonesia. Batang tubuh saya terasa hampa karenanya.

Pengertian atas politik nyata--realpolitik--buat saya telah memerlukan suatu dimensi baru. Realisme politik telah menjadi pengabdian yang bersifat politik, penyangkalan terhadap hati nurani individual, terbunuhnya hati nurani rakyat.

Saya mengerti betul apa yang kini ditakutkan Indonesia dan itu sama saja dengan apa yang kemarin ditakutinya. Yaitu anakhronisme ideologi dan atau kelompok-kelompok etnik yang ortodoks yang telah memicu perang di Yugoslavia dan di republik-republik bekas Uni Soviet. Teori-teori tidak akan membuktikan bahwa sejarah itu benar, tetapi sejarahlah yang akan memberlakukan mana teori-teori yang murni dan mana teori-teori yang palsu.

Fakta-fakta yang dilukiskan Tuan Soedjono berasal dari kesalahfahamannya mengenai kewarganegaraan Indonesianya yang terikat pada berbagai kebijakan pemerintahannya. Apalagi, ia ditunjuk oleh BAIS membela saya dan karena itu juga berarti ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 1992, saya membaca sebuah surat yang ditujukan kepada saya dari LBH (Lambaga Bantuan Hukum). Tanggal 23 Desember saya menjawab surat organisasi itu, dan menyatakan saya bersedia menerima bantuan seorang ahli hukum dari organisasi tersebut. Tetapi saya telah dipaksa untuk menolaknya. Pada tanggal 30 di bulan yang sama, saya diharuskan menulis surat kepada LBH untuk menolak kesediaannya membantu saya. Surat pertama saya sebagai jawaban kepada LBH, telah disanggong diperjalanan dan dikembalikan kepada saya.

BAIS adalah sebuah mesin yang penuh kuasa dari polisi rahasia Indonesia dan KOPASSUS adalah alat mereka yang mengerikan. Tentara Indonesia tidak dapat menerima kebijakan lain, kecuali kebijakan yang mereka pamerkan sejak 7 Desember 1975. Dalam hal kasus saya, kedua-duanya, baik pemerintah maupun BAIS menyimpulkan mereka akan memainkannya dengan resiko sesedikit mungkin dan untuk itu mereka memanipulasi seluruh prosedur peradilan. Buat saya, untuk mampu berada di sini hari ini dan mampu berbicara sebagai yang sekarang saya lakukan, saya juga telah mengambil sejumlah resiko yang memang ada di dalam perjuangan saya. Saya selalu mengatakan kepada setiap orang: "Tuan bicara dengan Xanana dan bukan dengan salah seorang "anggotanya" atau bawahannya".

Keadaan saya sendiri di mana segala gerak-gerik saya dikontrol luar biasa ketatnya, mengingatkan saya pada pengontrolan total terhadap penduduk Dili dan terutama terhadap para pemuda Timor- Timur yang heroik, yang diberlakukan segera sesudah pembantaian massal yang pengecut dari Santa Cruz.

Di POLWIL di mana mereka berusaha merayu saya dengan perhatian yang berlebih-lebihan, terdapat tulisan-tulisan inskripsi yang ditulis oleh para tahanan, kawan-kawan yang mendampingi saya yang tulisannya ada di dinding-dinding sel tahanan, tetap mengingatkan saya pada penderitaan yang ditanggungkan oleh banyak kawan seperjuangan saya. Mereka semua, adalah korban dari segala jenis penyiksaan yang juga tetap mengingatkan saya kembali pada hari 12 Nopember 1991 yang tak terlupakan itu. Keinginan apa yang ada dalam demonstrasi damai pada hari 12 Nopember itu ? Mengingatkan Jakarta dan Dunia pada perlunya dialog, mengingatkan Jakarta dan dunia bahwa telah terjadi sesuatu yang sudah sangat bersalahan di Timor-Timur.

Pada hari saya tertangkap, di dalam pertemuan saya dengan Jenderal Try Sutrisno, saya mengemukakan masalah dialog dengan para wakil dari rakyat Timor-Timur. Salah seorang dari duapuluhan jenderal yang hadir dengan saling memberi selamat sesamanya atas betapa luar biasa artinya kemenangan yang mudah itu, bertanya kepada saya dengan geram: "Rakyat mana ?". Tapi ketika saya menjawab: "Mari mengadakan referendum", para jenderal Indonesia itu segera harus menelan keangkuhannya. Pada hari berikutnya, 21 Nopember --saya sudah berada di Denpasar-- ketika isteri dari Panglima wilayah itu tercengang-cengang mengetahui betapa besar dukungan yang telah saya punyai, tiba-tiba berkata Nyonya itu, "akhirnya, banyak rakyat yang menyokong dia". Seorang perwira tinggi menukas, "Mungkin semua rakyat Timor-Timur".

Selama masa saya diinterogasi BAIS di Jakarta, saya menyadari bahwa: Perang di Timor-Timur adalah masalah esensial bagi BAIS. Ia bukan merupakan masalah politik bagi pemerintah di Jakarta, sebagaimana mungkin orang menganggapnya.

Pieter Kooijmans adalah rapportuer dari PBB. Ia dikirim ke Timor- Timur dengan persetujuan Jakarta guna menyidik di tempat-tempat mana saja hak azasi manusia dilanggar di Timor-Timur, karena pelanggaran-pelanggaran demikian selalu saja disangkal Indonesia di PBB. Dalam masa kunjungannya, pembantaian massal berdarah dingin yang justeru terjadi.

Mayat-mayat korban pembantaian yang berhilangan sampai hari ini, telah dilemparkan masuk ke dalam kuburan-kuburan massal. Di mana? Hanya tentara pendudukan yang tahu. Banyak dari para pembunuh itu kini hadir di ruangan sidang pengadilan ini, orang-orang dari KOPPASUS, orang intel, orang-orang yang di tangannya terletak kehidupan politik di Timor-Timur dan di Indonesia juga.

Apa dan siapa sebenarnya yang ditakuti tentara pendudukan Indonesia? Takut pada penduduk yang tak berdaya, penduduk yang Tuan-Tuan katakan telah senang dengan integrasi? Siapa lagi yang hendak Tuan-Tuan teror?

Di PBB, Jakarta tidak bisa menumpas fakta bahwa Portugis adalah fihak yang berkepentingan dalam penyelesaian permasalahan Timor- Timur. Dan kalau begitu, Jakarta hendaklah juga jangan pernah lupa bahwa rakyat Maubere (rakyat Timor-Timur) telah memperlihatkan bahwa cita-cita dan tujuan untuk mana mereka telah bangkit dan berlawan sampai hari ini, juga tidak akan pernah mati. Orang-orang pada mati, tapi cita-cita, tetap hidup.

Apabila pemerintah Indonesia tidak tahu ini, maka BAIS tentu tahu betul. Saksi Saturnino da Costa Belo (penterjemah terdakwa di pengadilan. Pen.) adalah contoh suci dari kepahlawanan orang- orang ini. Surat keterangan kesehatan yang dibuat tergesa-gesa dan menggelikan menerangkan bahwa Saturnino, sakit. Surat keterangan kesehatan itu, seyogianya telah mempermalukan semua yang hadir di ruangan sidang pengadilan ini, sebab Tuan-Tuan tahu betul bahwa segala-galanya terletak di tangan Tuan-Tuan di sini.

Pada hari pertama dan berikutnya, ketika mereka bertanya kepada saya, apakah saya menganggap diri saya orang Indonesia, saya selalu menjawab dengan cara: "Apabila saya katakan ya, maka bapak-bapak tidak akan percaya pada saya". Mula-mula mereka tertawa mendengar jawaban saya, tetapi kemudian gigi mereka gemeretak kegeraman.

Para jenderal Indonesia tidak perduli pada hal-hal yang bersifat kejiwaan seperti kesedaran dan hati nurani rakyat. Mereka sudah cepat berpuas diri jika kita melakukan apa yang mereka inginkan. Saya tidak tahu apakah ini dikarenakan kenaifan mereka atau bersebab pada latihan kemiliteran mereka.

Saya tahu bahwa BAIS mengatur segala hal yang diperlukan bagi hukuman mati saya, tetapi seandainya saya bersedia memuji-muji integrasi, saya akan dibebaskan.

Saya ingat suatu kejadian ketika saya berada di Jakarta. Untuk merobah tingkah-laku saya di tahanan, mereka membawa saya dengan diborgol melihat-lihat kota Jakarta dan akhirnya memperlihatkan betapa besarnya emas yang dipajang di puncak Monas, sebagai monumen nasional Indonesia. Saya serasa akan meneriaki para penjaga saya dan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menjual jiwa saya untuk emas dipuncak Monas dan tidak kurang dari itu, saya juga tidak akan pernah menjual rakyat saya. Saya tidak dapat mengkhianati harapan rakyat saya agar pada suatu hari saya hidup bebas dan merdeka.

Saya tidak akan pernah mengakui pendudukan yang kriminal atas Timor-Timur hanya untuk dapat hidup beberapa tahun lagi. Perjuangan saya lebih mulia daripada kehidupan saya. Rakyat Timor-Timur telah mengorbankan kehidupan mereka dan terus menderita karena cita-cita mereka.

Saya terus menerus menghimbau perlunya dialog dengan keikutsertaan orang-orang Timor-Timur. Saya selalu mengatakan kepada mereka yang bersedia mendengarkan saya bahwa rakyat Maubere tidak suka pada kata "pembangunan". Masalahnya ialah mereka tidak bebas dan tidak merdeka. Kemerdekaanlah yang dinilai tinggi oleh rakyat saya dan itulah tujuan perjuangan mereka. Dom Ximenes Belo menyatakannya secara lebih jelas ketika ia menulis surat untuk Sekretaris Jenderal PBB: "Kami sedang bermatian sebagai rakyat dan sebagai bangsa".

Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa datang untuk meminta kerjasama saya. Ia minta supaya saya tetap berpegangan pada apa yang telah saya katakan. Saya mencatat bahwa orang Indonesia telah sepenuhnya lupa bahwa saya telah berjuang selama 17 tahun dan untuk menjadi konsisten, maka saya harus konsisten terhadap rakyat saya dan tidak akan pernah terhadap para pembunuh rakyat saya, terhadap para penyerbu tanah air saya.

Dalam sebuah pidato di akhir Januari, Menteri Ali Alatas berkata: "Apabila kami tidak menerima, apabila Jakarta tidak mau menerima referendum, itu bukanlah karena kami takut kalah suara, tetapi karena rakyat sudah terlalu banyak menderita."

Duta Besar Indonesia untuk PBB mengatakan kepada saya: "Masalahnya adalah bahwa dialog itu sebagaimana kami memahaminya (dan karenanya oleh Jakarta juga) punya parameternya sendiri. Kami tidak menerima referendum."

Dalam tahun 1983, selama diadakan gencatan senjata, seorang yang pada waktu itu berpangkat Mayor (namanya tak terbaca. Pen.) dan seorang lagi bernama Gatot mengatakan dengan jelas kepada kami: "Kami tidak menerima referendum sebab kami tahu bahwa semua rakyat adalah Fretelin!"

Banyak saksi yang dihadapkan ke sini telah dicegah untuk mengatakan apa yang mereka ingin katakan. Semua tertuduh harus menyatakan bahwa mereka menyerah karena kemauan mereka sendiri.

Pengadilan ini mempersalahkan para korban yang ditahan di POLWIL, padahal mereka adalah tahanan yang telah diperlakukan tidak manusiawi. Cukup dengan sekilas saja melihat para saksi yang masih dipenjarakan yang di bawa ke ruangan sidang ini. Mereka begitu kurus.

Apakah mereka yang bertanggungjawab atas pembunuhan-pembunuhan pernah dihadapkan ke sidang pengadilan ini untuk mempertanggungjawabkan perilaku kriminal mereka? Apakah nilai suatu hukum yang di bawah hidungnya terjadi tindak kriminal yang mengerikan pada tanggal 12 Nopember? Nilai-nilai moral yang mana, pola keadilan mana yang ditegakkan orang Indonesia dengan mengangkat para pelaku tindak kriminal menjadi pahlawan, sedang para korban dipersalahkan?

Segala prosedur yang berhubungan dengan peradilan saya adalah masalah BAIS dan KOPASSUS dan para perwira mereka memenuhi ruangan sidang ini, mengawasi apa saja dan siapa saja. Jakarta seharusnya malu atas perilaku kriminalnya di Timor-Timur dan semestinya sudah lama mengakui bahwa ia kalah di Timor-Timur.

Para jenderal Indonesia hendaknya disadarkan bahwa mereka telah dikalahkan di Timor-Timur. Di sini hari ini, selaku Panglima dari Falintil, angkatan bersenjata yang mulia dari gerakan pembebasan nasional Timor-Timur, saya mengakui kekalahan militer saya sesuai kenyataan. Saya tidak malu untuk mengatakan begitu. Tapi sebaliknya, saya bangga atas kenyataan bahwa sebuah pasukan gerilya yang kecil saja telah mampu melawan suatu bangsa besar seperti Indonesia yang mempunyai kekuatan perang regional, namun dengan cara pengecut telah menginvasi kami dan hendak terus mendominasi kami melalui hukum teror dan kriminal, melalui hukum kekerasan, pengejaran dan penjara, penyiksaan dan pembunuhan.

Telah datang waktunya bagi Jakarta untuk mengakui kekalahan politiknya sesuai dengan kenyataan. Namun saya tidak tahu apakah untuk memancing kekaguman saya maka mereka memasang anggota pasukan bersenjata sepanjang jalan yang saya lalui dari POLWIL ke Pengadilan ini.

Saya telah dirayu dengan berbagai cara untuk meyakinkan saya supaya berperilaku sebagai orang Indonesia yang jinak. Saya seharusnya berperilaku demikian dan para saksi yang dibawa ke sini juga harus berperilaku yang sama. Saya tahu bahwa di belakang punggung saya mereka orang-orang BAIS dan KOPASSUS itu mengunyah-ngunyah gigi mereka karena marah. Mereka berbuat demikian karena mereka telah benar-benar menjadi pembunuh dari rakyat Maubere.

Siapa yang takut pada referendum? Dan mengapa mereka takut? Saya, tidak takut pada referendum. Dan jika saja pada hari ini, di bawah pengawasan internasional, rakyat Maubere memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia, saya akan dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada kawan-kawan seperjuangan saya di hutan-hutan untuk meletakkan senjata dan saya akan menyerahkan kepala saya untuk dipenggal di muka umum. Barangsiapa takut pada referendum, ia juga takut pada kebenaran.

Mengapa segala aparat tentara memenuhi ruangan pengadilan yang memuakkan ini? Mengapa pasukan bersenjata mereka ditempatkan di sepanjang jalan dengan senjata siap tembak?

Saya berseru kepada generasi baru Indonesia agar memahami bahwa rakyat Timor-Timur lebih menghargai kemerdekaan, keadilan dan perdamaian daripada pembangunan yang dilakukan di luar sana berkat bantuan Australia, Amerika Serikat dan negeri Eropa lainnya yang punya hubungan ekonomi erat dengan Jakarta.

Saya menghimbau rakyat Indonesia untuk memahami bahwa menurut prinsip-prinsip universal dan hukum internasional, Timor-Timur dianggap sebagai wilayah non-otonomi sesuai dengan norma-norma yang mengatur proses dekolonisasi. Saya menyerukan rakyat Indonesia memahami bahwa Timor-Timur bukanlah ancaman bagi Indonesia atau faktor yang mengancam keamanan Indonesia. Dongeng yang mereka ceritakan kepada anda bahwa Timor-Timur itu adalah komunis, adalah cerita usang. Kami tidak hendak memecah-mecah

Indonesia. Sebab kenyataannya, Timor-Timur tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia.

Saya berseru kepada masyarakat internasional untuk mengerti bahwa sudah datang waktunya memperlihatkan bahwa Tatanan Dunia Baru sudah mulai terbentuk. Ini memerlukan tindakan dan aksi yang akan mengakhiri keadaan yang diwarisi dari masa lampau.

Saya menyerukan Masyarakat Eropa konsisten pada resolusi- resolusinya sendiri dan tetap konsisten dengan segala resolusi yang diambil sehubungan dengan Timor-Timur.

Saya menyerukan semua kawan-kawan dari Timor-Timur, para parlementarir dari Eropa, Amerika, Jepang dan Australia untuk meneruskan tekanan pada pemerintahan mereka sendiri-sendiri agar merobah sikap mendua dan dobel standar terhadap kasus yang sama di mana terjadi pelanggaran sistematis terhadap resolusi-resolusi PBB, seperti terjadi dengan perilaku Indonesia dalam hal Timor- Timur.

Saya berseru kepada Presiden Bill Clinton agar mempertimbangkan permasalahan Timor-Timur dan menekan Jakarta agar menerima dialog dengan Portugis dan orang-orang Timor- Timur guna menemukan penyelesaian internasional yang dapat masuk akal.

Saya berseru kepada Pemerintah Portugis untuk tidak meninggalkan tanggungjawabnya terhadap Timor-Timur.

Saya berseru kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa agar menjamin bahwa dalam mencarikan penyelesaian permasalahan Timor-Timur digunakan prinsip-prinsip universal dan hukum internasional, sebagai dasar.

Akhirnya saya berseru kepada Pemerintah Indonesia untuk merobah sikapnya dan menyadari bahwa waktu telah datang untuk memahami esensi dari perjuangan di Timor-Timur.

(Dimulai dengan hari ini, saya akan menjalani mogok makan, sebagai suatu cara yang praktis untuk menghimbau Masyarakat Eropa, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Australia).

Tidak ada persetujuan yang dapat dicapai antara tahanan dengan para penjaganya.

Kepada Sekretaris Jenderal PBB, saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk hadir di dalam proses negosiasi di sembarang waktu dan di sembarang tempat. Betapapun saya tidak akan pernah menerima untuk menjadi bagian dari pihak Indonesia di dalam negosiasi, sebab saya tidak ikut serta di dalam lelucon integrasi dan di dalam penindasan yang bersifat kriminal atas rakyat saya.

Sebagai tahanan politik yang berada ditangan tentara pendudukan asing atas tanah air saya, samasekali bukanlah suatu konsekwensi bagi saya, apabila mereka menjatuhkan hukuman mati atas diri saya hari ini. Mereka telah membunuhi lebih dari sepertiga penduduk Timor-Timur yang tak berdaya. Mereka membunuhi rakyat saya dan saya tidaklah lebih berharga daripada perjuangan heroik rakyat saya, hanya karena mereka rakyat yang kecil dan lemah yang selalu menjadi sasaran penguasaan asing."❑

Dili, 27 Maret 1993

(tertanda)

Xanana Gusmao
(Anggota CNRM & Panglima Falintil).

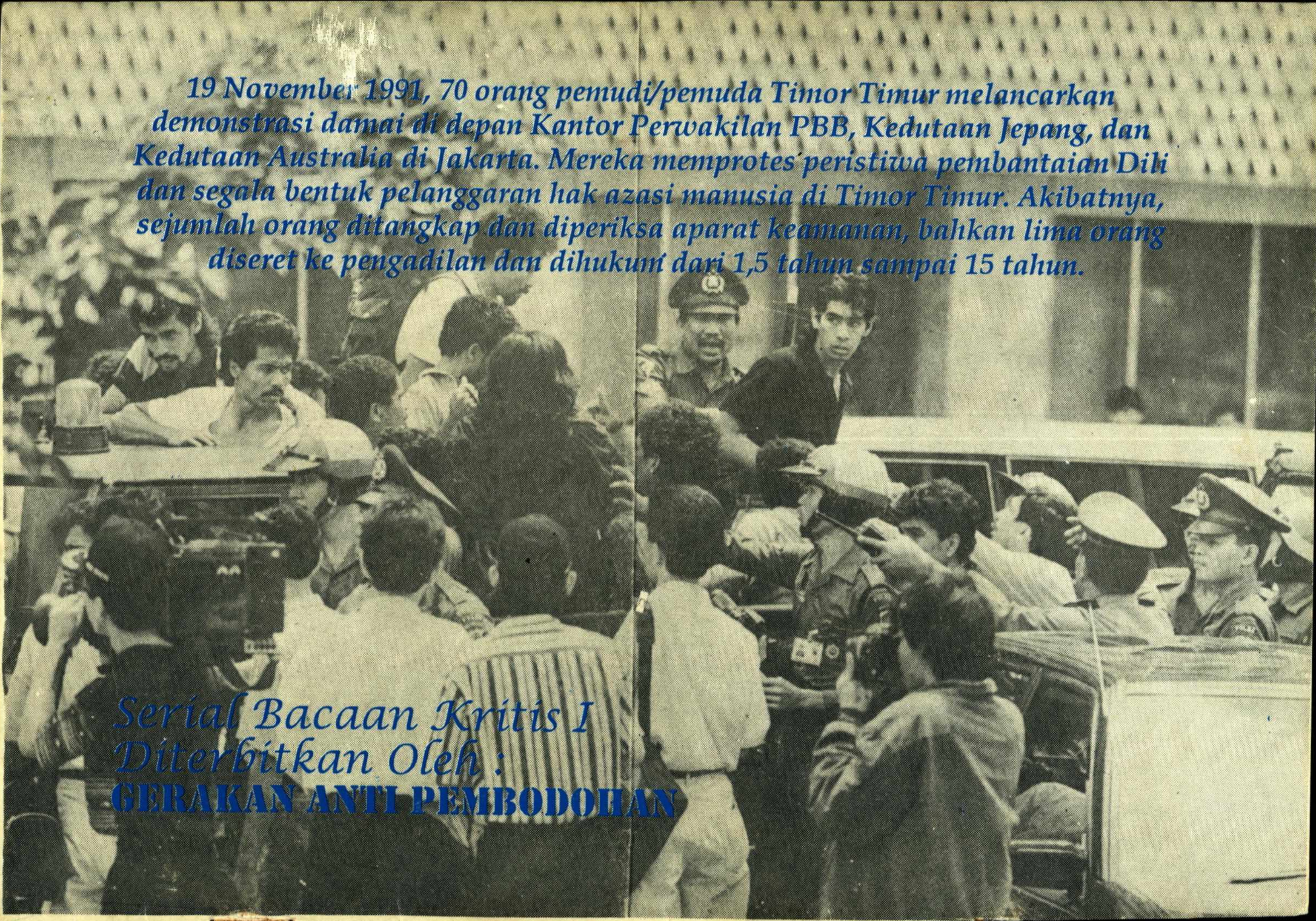

19 November 1991, 70 orang pemudi/pemuda Timor Timur melancarkan demonstrasi damai di depan Kantor Perwakilan PBB, Kedutaan Jepang, dan Kedutaan Australia di Jakarta. Mereka memprotes peristiwa pembantaian Dili dan segala bentuk pelanggaran hak azasi manusia di Timor Timur. Akibatnya, sejumlah orang ditangkap dan diperiksa aparat keamanan, bahkan lima orang diseret ke pengadilan dan dihukum dari 1,5 tahun sampai 15 tahun.

Serial Bacaan Kritis I
Diterbitkan Oleh :
GERAKAN ANTI PEMBODOHAN